

## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.<sup>1</sup> (Q.S Al-Baqarah : 188)

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cetakan Kedua (Bandung: PT Mizan Buaya Kreativa, 2012), h.29

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Papa Syafruddin Haraba dan Mama Siti Ruaida terima kasih atas doa tulus dan kasih sayang yang tak terhingga, serta segala pengorbanannya mendukung dan memberikan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung demi kelancaran dan kesuksesan studiku.
2. Kakak Yuris Morina Permata, Abang Mabruri, serta adik-adikku tersayang Sarah Salsabila, Spinoza, dan Rizqika Kamila, yang selalu memberikan doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Lia Dwi Dana, yang telah membantu tenaga, pikiran, prasarana dan doa sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan target waktu yang tepat.
4. Sahabat-sahabat UKMF GEMAIIS dan UKM BAPINDA yang selalu menyeru, mengajak dan mengingatkan kepada kebaikan.
5. Almamater UIN Raden Intan Lampung Tercinta.

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Sulthon, anak ke tiga dari enam bersaudara lahir dari pasangan Bapak Syafruddin Haraba dan Ibu Siti Ruaida. Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 23 Maret 1996.

Penulis mempunyai riwayat pendidikan pada:

1. Taman Kanak-Kanak Kartini Palapa Durian Payung Kota Bandar Lampung pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2003;
2. Sekolah Dasar 1 Susunan Baru Kota Bandar Lampung pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2008;
3. SMP Negeri 7 Bandar Lampung pada Tahun 2008 dan selesai pada tahun 2011;
4. Madrasah Aliyah NU Nurul Huda Kota Semarang pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014;
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Islam) pada Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2014 dan selesai pada tahun 2018.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji dan syukur kehadiran Allah Swt. Yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Barang Tiruan Merek Internasional Adidas (Studi Kasus Pada Toko sepatu Feetland dan Toko Adidas Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tersampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan study pada program Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
2. Dr. Siti Mahmudah. S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Drs. H. Ahmad jalaluddin, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan menyelesaikan skripsi ini;
3. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H., selaku ketua jurusan muamalah dan Khoiruddin, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Muamalah yang senantiasa membantu memberikan arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya;
4. Bapak/ Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum;

5. Kepada tim penguji: Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. selaku Ketua sidang munaqosah, Muhammad Irfan., M.H.I. selaku sekretaris, Dr. Iskandar Syukur, M.A. selaku Penguji I, Drs. H. A. Jalaluddin, S.H., M.M. selaku penguji II sekaligus Pembimbing II, dan Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I yang senantiasa membantu dan memberikan arahan yang baik.
6. Bapak Yudi dan bapak Hasan selaku pemilik Toko Feetland dan Toko Adidas Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung serta para karyawan yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk diwawancarai;
7. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
8. Sahabat-sahabatku, MA NU Nurul Huda Kota Semarang dan Pondok Pesantren di sekitaran wilayah Mangkang, khususnya Pondok Pesantren Futuhiyyah Darussalam, Mangkang Kulon Kota Semarang.
9. Unit Kegiatan Mahasiswa BAPINDA;
10. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas GEM AIS;
11. *My dearest* Lia Dwi Dana, yang selalu memberikan dukungan doa, semangat dan membantu baik dari tenaga, pikiran dan laptopnya ☺ serta selalu menemani saat penelitian lapangan.
12. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu Muamalah B 2014;
13. Rekan-rekan KKN 18 & 19 Akselerasi (desa sinar Rejeki) 2017 serta rekan KKN 9 & 10 (desa babatan Lampung Selatan) 2017 yang tidak bisa disebutkan satu persatu
14. Almamater tercinta.

“Tak ada gading yang tak retak”, itulah pepatah yang dapat menggambarkan skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan, hal itu disebabkan karena keterbatasan, kemampuan, waktu, dana, dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi skripsi ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang ke-Islaman.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Bandar lampung, Januari 2018

**Sulthon**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	7

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam.....	14
B. Khiyar.....	51
C. Jual Beli Barang Tiruan Menurut Hukum Positif.....	63

### **BAB III DATA LAPANGAN**

A. Gambaran Tempat Penelitian Toko Sepatu Feetland Bandar Lampung.....	79
1. Sejarah Singkat Toko Feetland.....	79
2. Lokasi Toko Feetland Bandar Lampung.....	80
3. Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja Toko Feetland.....	81
4. Daftar Harga Sepatu di Toko Feetland Bandar Lampung.....	82

B. Gambaran Tempat Penelitian Toko Adidas Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung.....	83
1. Sejarah Singkat Toko Adidas Mall Boemi Kedaton.....	83
2. Lokasi Toko Adidas Mall Boemi Kedaton.....	83
3. Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja Toko Adidas Mall Boemi Kedaton.....	84
4. Daftar Harga Sepatu di Toko Adidas Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung.....	86
C. Praktik Jual Beli Sepatu Merek Adidas.....	87
1. Asal Barang yang didapat.....	87
2. Praktik jual beli sepatu Adidas di Toko Feetland Bandar Lampung...	88
3. Praktik jual beli sepatu Adidas di Toko Adidas Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung.....	94

#### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Analisis Praktik Jual Beli Sepatu Merek Internasional Adidas Pada Toko Sepatu Feetland Bandar Lampung dan Toko Adidas Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung.....	98
B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Barang Tiruan Sepatu Merek Internasional Adidas di Toko Sepatu Feetland Bandar Lampung.....	100

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	108
B. Saran .....	109

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Persoalan dalam skripsi ini dapat dipahami dengan mengemukakan istilah-istilah yang terkandung dalam judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Barang Tiruan Merek Internasional Adidas” antara lain sebagai berikut:

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Sedangkan kata tinjauan menurut bahasa berasal dari kata “tinjau” yang berarti pandangan atau pendapat sesudah mempelajari atau menyelidiki suatu masalah.<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah hasil daya upaya para *fuqaha* dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan keutuhan masyarakat, dapat pula dikatakan bahwa hukum Islam adalah syariat yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat masa.<sup>2</sup>
3. Hukum Positif adalah hukum yang sedang berlaku dalam suatu negara, sedangkan hukum positif menurut C.S.T. Kansil adalah hukum yang

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h.951

<sup>2</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2001), h.21

berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.<sup>3</sup>

4. Jual Beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (*aqad*).<sup>4</sup> Secara singkat Pengertian jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan Syara' (Hukum Islam).<sup>5</sup>
5. Barang tiruan dalam hal ini, barang diartikan sebagai benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau yang bejasad).<sup>6</sup> Sedangkan tiruan berarti membuat sesuatu yang tidak sejati.<sup>7</sup> Sehingga barang tiruan ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang berwujud yang diperoleh dari cara meniru produk orang lain.
6. Merek Internasional yaitu nama atau simbol yang disosialisasikan dengan produk atau jasa dan menimbulkan asosiasi yang menyangkut bangsa, negeri atau seluruh seluruh dunia.<sup>8</sup>
7. Adidas, merupakan perusahaan yang memproduksi alat olahraga terbesar di Eropa dan terbesar kedua di dunia. Perusahaan ini banyak memproduksi alat- alat olahraga seperti tas, sepatu, kemeja, pakaian,

---

<sup>3</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), h.73

<sup>4</sup> H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h.278

<sup>5</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.140

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit*, h.80

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1472

<sup>8</sup> <https://Kbbi.Web>, diakses Tanggal 29 Mei 2017, 16.30 WIB

dan yang tentunya barang yang berhubungan dengan kebutuhan dalam berolahraga.<sup>9</sup>

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan penulis memilih judul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Barang Tiruan Merek Internasional Adidas”**

1. Secara Objektif, bahwa dewasa ini sering terjadi kegiatan jual beli barang tiruan sepatu, dengan menggunakan merek terkenal di tengah-tengah masyarakat, khususnya pada merek Internasional Adidas. Sehingga penelitian ini dianggap perlu dan penulis tertarik untuk menganalisisnya dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Positif.
2. Secara Subjektif, penelitian ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dimana kajian tentang jual beli barang tiruan merupakan kajian dalam bidang Muamalah yang ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini semakin pesat pertumbuhan jual beli dalam memenuhi kebutuhan gaya hidup yang dibutuhkan oleh konsumen, baik bertambah dari jumlah maupun jenisnya. Hal ini mendorong perusahaan-perusahaan untuk dapat memuaskan kebutuhan konsumen dengan cara menghasilkan produk

---

<sup>9</sup><https://VIVA.Co.Id>, diakses Tanggal 29 Mei 2017, 16: 55 WIB

bermerek yang sesuai dengan keinginan konsumen. Keadaan ini khususnya terjadi pada perusahaan yang memproduksi sepatu merek Adidas.

Perusahaan adidas merupakan perusahaan yang memproduksi alat olahraga terbesar kedua di dunia yang tentunya barang yang berhubungan dengan kebutuhan dalam berolahraga seperti sepatu.<sup>10</sup> Tahap pengenalan dimaksudkan untuk membangun citra atau posisi merek pada saat memasuki pasar dengan menampilkan barang-barang yang tersedia dan posisi yang dapat meningkat ke tahap selanjutnya.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan industri yang telah merambah dunia usaha dan perdagangan maka hal tersebut juga telah mengubah selera masyarakat dalam hal pemakaian barang dengan merek terkenal telah menjadi inspirasi dan mode masyarakat Bandar Lampung dan sekitarnya saat ini, tidak peduli apakah merek tersebut palsu ataupun asli. Memakai barang dengan merek terkenal memberikan rasa kepuasan dan kebanggaan tersendiri bagi para pemakainya. Walau terkadang produk tersebut tidak meyakinkan.

Kondisi ini telah menjadi peluang bagi para pelaku usaha untuk memuaskan keinginan konsumen, dengan menawarkan barang yang tidak asli atas suatu merek terkenal yang menempel pada produk tiruan atau merek-merek yang hanya mirip dengan harga barang yang sangat miring dan seringkali memang di sesuaikan dengan kondisi ekonomi konsumen yang mempunyai kecenderungan demikian serta ada juga yang menjual

---

<sup>10</sup> <https://VIVA.Co.Id>, diakses Tanggal 29 Mei 2017, 16: 55 WIB

lebih mahal agar kelihatan lebih bergengsi. Akhirnya terjadilah titik temu antara permintaan dengan penawaran konsumen mengutamakan faktor gengsi untuk memperoleh kepuasan karena berhasil menikmati barang-barang dengan mirip dan merek terkenal. Sedangkan para pelaku usaha yang memanfaatkan keadaan tersebut mendapatkan keuntungan begitu mudahnya dengan membonceng pada merek Internasional Adidas.

Jual beli sepatu tiruan ini terjadi di toko Feetland Bandar Lampung, yaitu toko sepatu yang banyak menjual sepatu bermerek Internasional Adidas yang dibidang cukup banyak konsumen yang berkunjung dan membeli sepatu di toko Feetland Bandar Lampung. Walaupun Undang-undang Merek pada umumnya ditujukan untuk mengatur pemakaian merek agar para pemakai merek tidak saling merugikan, namun pengaturan tentang lalu lintas pemakaian merek tersebut sangat bermanfaat pula bagi para konsumen, terutama karena konsumen dapat bebas dari kekeliruan pemakaian barang-barang tertentu yang bermerek palsu. Hal tersebut disebabkan karena konsumen yang biasanya sudah terikat menggunakan merek-merek tertentu yang dikenalnya, sehingga manakala terjadi pemalsuan, maka sangat besar kemungkinan konsumen mengalami kerugian karena mengonsumsi secara keliru barang tertentu yang kualitasnya berbeda dengan yang biasanya.<sup>11</sup>

Yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana hukum Islam dan hukum positif menyikapi jual beli sepatu di toko Feetland Bandar

---

<sup>11</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 72-73

lampung. Melihat barang yang dijual tersebut merupakan barang yang bukan original (imitasi) sesuai dengan merek yang tertera di barang tersebut. Dari permasalahan tersebut penulis memiliki keinginan untuk melakukan penelitian dan pembahasan secara mendalam dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Barang Tiruan Sepatu Merek Internasional Adidas”** (Studi Kasus Pada Toko Sepatu Feetland Bandar Lampung dan Toko Adidas Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung)

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil, yakni:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Sepatu Merek Internasional Adidas Pada Toko Sepatu Feetland Bandar Lampung dan Toko Adidas Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Barang Tiruan Sepatu Merek Internasional Adidas di Toko Sepatu Feetland Bandar Lampung dan toko Adidas Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian ini memiliki tujuan:

- a. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli barang tiruan sepatu merek Adidas dalam konteks penjual dan pembeli.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif terhadap jual beli barang tiruan sepatu merek Adidas dalam konteks penjual dan pembeli.

## **2. Kegunaan penelitian**

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap jual beli barang tiruan di masa kini. Selain itu diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca penelitian dan penulis dengan harapan menjadi baik, sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini berupa penelitian lapangan (*field research*). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini di lapangan kehidupan. Pada hakikatnya penelitian

lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat.<sup>12</sup>

Dalam hal ini akan langsung mengamati praktik jual beli barang tiruan sepatu di toko sepatu Feetland Bandar Lampung. Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

## **2. Sifat Penelitian**

Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisa secara bertahap dan berlapis dengan kualitatif berdasarkan teori tentang jual beli barang tiruan yang bersifat deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta- fakta, sifat- sifat, ciri- ciri, serta hubungan diantara unsur- unsur yang ada dan fenomena tertentu.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini akan di deskripsikan tentang bagaimana praktik dari kegiatan jual beli barang tiruan. Serta penelitian yang bersifat Komparatif yang membandingkan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu

---

<sup>12</sup> Koenjaraningrat, *metode-metode penelitian masyarakat* (Jakarta: gramedia, 1986), h.5

<sup>13</sup> Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h.58



untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.<sup>14</sup>

### **3. Data dan Sumber Data**

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari jual beli barang tiruan sepatu Merek Internasional Adidas. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain).<sup>15</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian (Toko sepatu Feetland Bandar Lampung dan Toko Adidas Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung). Yaitu seperti: karyawan toko, pembeli, serta penjual.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya: bahan primer Fiqih, Al-Qur'an, Hadist, KHES, dan Undang-Undang Merek. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku- buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak

---

<sup>14</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.49

<sup>15</sup> Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi penelitian* (Bandung: CV.Mandar Maju, 2002), h.73

langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.<sup>16</sup>

#### **4. Populasi dan Sampel**

##### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian sejumlah manusia, benda-benda, gejala, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.<sup>17</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pembeli, pemilik dan karyawan di toko sepatu Feetland Bandar Lampung, yaitu berjumlah 9 orang yang terdiri dari 1 pemilik toko, 3 karyawan toko, dan 5 orang pembeli. Serta 9 orang yang terdiri dari 1 penanggung jawab toko, 3 karyawan toko, dan 5 orang pembeli di toko Adidas Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung.

##### **b. Sampel**

Sampel adalah contoh yang mewakili dari populasi dan cermin dari keseluruhan objek yang diteliti.<sup>18</sup> Untuk menentukan ukuran sampel, penulis memakai rumusan sampel yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto yang apabila subjeknya kurang dari 100 orang maka akan diambil semua sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi dan jika besar subjeknya melebihi dari 100

---

<sup>16</sup>Sugiyono, *metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h.137

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Fakultas Teknologi UGM, (Yogyakarta: UGM Press, 1986), h.27

<sup>18</sup> Sutrisno, *Metodelogi Penelitian Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Fakultas Teknologi UGM, 2009), h.120

orang dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25%. Karena populasi dari penelitian ini kurang dari 100, maka populasi diambil semua.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

### **a. Observasi**

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala dan fenomena yang ada pada objek penelitian. Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>19</sup> Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati praktik jual beli barang tiruan yang dilakukan masyarakat.

### **b. Interview/ Wawancara**

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>20</sup> Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak pemilik dan karyawan toko serta

---

<sup>19</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet 9 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h.154

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Reneka Cipta, 2013), h.198

konsumen dan masyarakat yang terlibat dari dampak kegiatan jual beli barang tiruan tersebut.

**c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan variable yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen- dokumen tertentu yang dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan foto.<sup>21</sup> Untuk metode ini sumber datanya berupa catatan, buku- buku, surat kabar, majalah atau dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian. Yaitu data-data yang terkait dengan jual beli barang tiruan merek internasional Adidas.

**6. Metode Pengolahan Data**

**a. Editing**

Editing adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpulkan sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah relevan dengan data penelitian lapangan maupun dari studi literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.

**b. Coding**

Coding adalah pemberian tanda pada kata yang diperoleh, baik berupa penomoran atau symbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h.188

<sup>22</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.63

### c. Sistemating

Sistemating yaitu melakukan pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.<sup>23</sup>

## 7. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktik jual beli barang tiruan terkenal merek Internasional Adidas menurut tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif analitis berdasarkan teori jual beli. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui jual beli barang tiruan terkenal merek Adidas. Tujuannya dapat dilihat dari Hukum Positif dan sudut Hukum Islam agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai jual beli barang tiruan merek Internasional Adidas dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan suatu gejala atau kaidah- kaidah di lapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.4



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

#### 1. Pengertian jual beli

Jual beli menurut bahasa (etimologi) berarti “*al-bai*” yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'i*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah*,<sup>1</sup> hal ini sebagaimana firman Allah Swt:

...يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “Mereka mengharapkan tijarah (perniagaan) yang tidak akan rugi”. (Q.S. Fathir: 29)

Secara istilah (terminologi) terdapat beberapa pendapat ulama fiqih mendefinisikan jual beli, sekalipun memiliki substansi dan tujuan yang sama antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu:

- 1) Definisi dalam arti umum

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالتَّقْدِيرِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوِهَا أَوْ مَبَا ذَلِكُ

السَّلْعَةِ بِالتَّقْدِيرِ أَوْ نَحْوِهَا عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hendi Subendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: rajawali Pers, 2010), h.67

<sup>2</sup> Abdurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh 'Alal Madzahib Al-Arba'ah*, Juz II (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), h.134

Artinya: “Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus”.

2) Definisi dalam arti khusus

وَهُوَ مُبَا دَلَّةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ<sup>3</sup>

Artinya: “Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara khusus.”

- b. Menurut ulama Malikiyah membagi definisi jual beli kedalam dua macam, yaitu:

1) Definisi dalam arti umum

فَهُوَ عَقْدٌ مَعَ وَضْعٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةٍ لَذَّةٍ<sup>4</sup>

Artinya: “Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan”.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h.135

<sup>4</sup> Syamsudin Muhammad Ar-Ramhi, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), h.204



dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.<sup>5</sup>

## 2) Definisi dalam arti khusus

أَحَدُ عَوَظِيَّةٍ غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، مُعَيَّنٌ فَهُوَ عَقْدٌ مُعَا وَضَعَهُ  
عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةٍ لَدَّةٍ أَمْكَائِسَةٍ غَيْرُ الْعَيْنِ فِيهِ<sup>6</sup>

Artinya: “Jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang”.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan tidak seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Hendi Subendi, *Op.Cit.*, h.69

<sup>6</sup> Syamsudin Muhammad Ar-Rahmi, *Op.Cit.*, h.372

<sup>7</sup> Hendi Subendi, *Op.Cit.*, h.70

- c. Menurut Imam Syafi'i memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.<sup>8</sup>
- d. Menurut Ibnu Qudamah berpendapat bahwa jual beli adalah

مُبَا دَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا وَتَمْلُكًا<sup>9</sup>

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik”.

- e. Menurut Wahbah Az-Zuahaili mendefinisikan jual beli menurut istilah adalah tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab qabul* atau *mu'athaa* (tanpa *ijab qabul*).<sup>10</sup>

## 2. Dasar hukum jual beli

### a. Al-Qur'an

Hukum jual beli yang di syari'atkan dalam Islam yang bersumber dari Al-qur'an antara lain:

---

<sup>8</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka azzam, 2013), h.1

<sup>9</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz III, h.559

<sup>10</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.25

1) Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275:

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ....

Artinya: “padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. Al-Baqarah: 275)<sup>11</sup>

Quraish shihab menafsirkan ayat di atas dala bukunya yaitu jual beli adalah transaksi yang menguntungkan. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia, yang kedua yang menghasilkan uang bukan kerja manusia dan jual beli menurut aktivitas manusia.<sup>12</sup>

Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan melakukan transaksi jual beli dan mengharamkan riba. Riba adalah salah ssatu kejahatan jahilyyah yang hina.<sup>13</sup> Menurut syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi adapun yang disebabkan riba tersebut yaitu bencana besar, musibah yang kelam, dan penyakit yang berbahaya. Orang yang menerima riba maka kefakiran akan datang padanya dengan cepat.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, cetakan kedua (Bandung: PT Mizan Buaya Kreativa, 2012), h.48

<sup>12</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera hati, 2009), h.721

<sup>13</sup> Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, Juz' 1-3 (Semarang: Yayasan Nurul Islam, 1990), h.65

<sup>14</sup> Surawardi k. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.31

- 2) Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ ....

Artinya:”Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu” (Q.S. Al-Baqarah: 198)<sup>15</sup>

- 3) Q.S. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bathil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa: 29)<sup>16</sup>

Isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa larangan memakan harta yang berada di tengah mereka dengan *bathil* itu mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan. Bahkan mengantarkannya kepada kejahatan dan

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.* h.47

<sup>16</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.* h.84

kehancuran, seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain-lain.<sup>17</sup>

Penghalalan Allah Swt terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah bahwa Allah Swt menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka.<sup>18</sup>

## **b. Hadits**

### **1) Hadits Riwayat Al-Bazzar**

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ الطَّيِّبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ جُلٍ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه الحاكم)<sup>19</sup>

Artinya: “ Dari Rifa’ah bin Rafi’i r.a, bahwasanya Nabi Saw pernah ditanya, “Pekerjaan apa yang paling baik?”, maka beliau menjawab: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.”

<sup>17</sup> M Quraish Shihab, *Op. Cit.*, h.413

<sup>18</sup> Imam Syafi’I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Op. Cit.*, h.1-2

<sup>19</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h.303

### c. Ijma'

Para ulama fiqh dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.<sup>20</sup> Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgent, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan yang di syari'atkan. Oleh karena itu praktik jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah Saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan di syari'atkannya jual beli.<sup>21</sup>

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan. Sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah ada di prinsip muamalah,<sup>22</sup> yaitu:

- 1) Prinsip Kerelaan
- 2) Prinsip Bermanfaat
- 3) Prinsip Tolong Menolong
- 4) Prinsip tidak Terlarang

---

<sup>20</sup> Rachmat Syafei', *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.75

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh kamaluddin A. Marzuki, *Terjemahan Fiqh Sunnah*, Jilid 3 (Bandung: Al Ma'arif, 1987), h.46

<sup>22</sup> H.M. Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h.144

Berdasarkan kandungan firman Allah Swt, sabda-sabda Rasul dan Ijma' dia atas, para fuqaha mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah. Beda dengan Imam Ghozali sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul *fiqh muamalah* bahwa bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang bisa membuat arak, atau menjual kurma basah kepada orang yang bisa membuat arak walaupun si pembeli adalah orang kafir.<sup>23</sup>

Hukum asal jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi hukumnya bisa berubah menjadi wajib, mahdub, makruh bahkan bisa menjadi haram pada situasi-situasi tertentu.<sup>24</sup>

### 3. Rukun & syarat jual beli

#### a. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantar para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut madzhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul* saja, menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk bejual beli. Namun karena unsur kerelaan itu berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (*ijab* dan *qabul*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu

---

<sup>23</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010), h.89

<sup>24</sup> *Ibid.*, h.90

saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:<sup>25</sup>

1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

a) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*)

b) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).<sup>26</sup>

2) Sighat

Sighat (*ijab* dan *qabul*) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.<sup>27</sup>

3) Ada barang yang dibeli

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaihi*, yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), h.118

<sup>26</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.141

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No.2 (Desember 2015), h.249



4) Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).<sup>29</sup>

**b. Syarat jual beli**

Menurut jumhur ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

1) Syarat orang yang berakad

Ulama fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

a) Baligh dan berakal

Dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah akil baligh dan berakal.

Baligh menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan baligh (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan. Oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah, namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk,

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h.251

<sup>30</sup> M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, h.119

tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut di perbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai.<sup>31</sup>

b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.<sup>32</sup>

c) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

Maksudnya seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan.<sup>33</sup>

d) Keduanya tidak mubazir

Maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Artinya ia tidak

---

<sup>31</sup> A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit.* h.143-144

<sup>32</sup> A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h.142

<sup>33</sup> M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, h.120

dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.<sup>34</sup>

2) Syarat Yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat saat akad berlangsung. *Ijab qabul* harus diucapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Ulama fikih menyatakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkan telah *akil baligh* dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal ( Ulama madzhab hanafi), sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan di atas.
- b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Contohnya: “*Saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu*”, lalu pembeli menjawab: “*saya beli dengan harga sepuluh ribu*”.
- c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.
- d) Janganlah diselingi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h.143

- 3) Syarat barang yang di perjualbelikan adalah sebagai berikut:
- a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Umpamanya barang itu ada pada sebuah toko atau masih di pabrik dan yang lainnya di simpan di gudang. Sebab adakalanya tidak semua barang yang dijual berada di toko atau belum dikirim dari pabrik, mungkin karena tempat sempit atau alasan-alasan lainnya.
  - b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, oleh sebab itu bangkai, khamar, dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
  - c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan seperti memperjualbelikan kan di laut dan emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
  - d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

---

<sup>35</sup> A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h.148

#### 4) Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting yang sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fikih membedakan antara *as-tsamm* dan *as-si'r*. Menurut mereka *as-tsamm* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal kepada konsumen, dengan demikian ada dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).

Ulama fikih mengemukakan syarat *as-tsamm* sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran cek atau kartu kredit apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'

#### 4. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi hukumnya ada dua macam yaitu: jual beli yang sah menurut hukum dari segi objek jual dan dari segi pelaku jual belinya.<sup>36</sup>

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk,<sup>37</sup> yaitu:

- a. Jual beli yang kelihatan, yaitu yang pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian yaitu jual beli salam (pesanan).
- c. Jual beli benda atau barang yang tidak ada serta tidak dapat dilihat yaitu jual beli yang dilarang agama Islam karena di khawatirkan akan menimbulkan kerugian diantara satu pihak.

Madzhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi dua bentuk,<sup>38</sup> yaitu:

- a. Jual beli yang shahih, yaitu jual beli yang telah memenuhi rukun-rukun ataupun syarat-syarat yang telah ditentukan, barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat pada khiyar lagi. Maka jual beli itu shahih dan dapat mengikat keduanya.

---

<sup>36</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.71

<sup>37</sup> A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h.20

<sup>38</sup> M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, h.128-129

b. Jual beli yang bathil yaitu jika jual beli tersebut satu atau seluruh syaratnya tidak terpenuhi, macam-macam jual beli bathil:

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada

Menurut para ulama fikih bahwa jual beli barang yang tidak ada hukumnya tidak sah, seperti menjual buah-buahan yang baru berkembang.

2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Hukum dari penjualan tersebut adalah tidak sah seperti menjual burung yang telah lepas dari sangkarnya.

3) Jual beli yang mengandung unsur tipuan

Jual beli seperti ini juga tidak sah karena mengandung unsur tipuan yang mengakibatkan adanya kerugian, seperti menjual barang yang kelihatannya baik padahal barang tersebut tidak baik.

4) Jual beli barang najis

Jual beli benda atau barang yang najis hukumnya tidak sah, seperti babi, bangkai, darah, khamar, sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna-makna dalam arti hakiki menurut syara'

5) Jual beli *al-urbhan*

Jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian yaitu apabila barang yang telah dikembalikan lagi kepada si penjual,

maka uang muka yang telah dibayar menjadi milik penjual dan jual beli tersebut tidak diperbolehkan.<sup>39</sup>

6) Jual beli *fasid*

Menurut ulama madzhab Hanafi membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang batal apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan maka hukumnya batal. Seperti menjual belikan benda-benda haram (khamar, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli itu dinamakan *fasid*. Akan tetapi jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dengan jual beli yang batal. Diantara jual beli yang *fasid* menurut ulama Hanafiyah, antara lain:<sup>40</sup>

- a) Jual beli *al majhl*, yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui secara menyeluruh.
- b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat.
- c) Jual beli barang yang *ghoib*, tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- d) Jual beli orang buta. Dimana orang buta tidak melihat barang yang di perjualbelikan. Menurut fuqoha Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabillah jual beli orang buta hukumnya sah dan ia memiliki khiyar sepanjang ia dapat mengenali seperti

---

<sup>39</sup> M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, h.130

<sup>40</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media, 2009), h.125-126



melalui perabaan atau penciuman. Menurut Syafi'iyah jual beli orang buta tidak sah, kecuali sebelumnya ia mengetahui barang yang hendak dibelinya dalam batas waktu yang tidak memungkinkan terjadi perubahan atasnya. Hal ini disebabkan karena bagi orang buta barang yang diperjual belikan bersifat *majhul*.<sup>41</sup>

- e) Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya barang-barang yang diharamkan menjadi harga.
- f) Jual beli *ajal*. Misalnya Seseorang menjual barangnya dengan harga Rp. 100.000,- yang pembayarannya ditunda selama satu bulan kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli pemilik barang pertama membeli kembali barang itu dengan harga yang lebih rendah, dengan harga Rp. 75.000,-.
- g) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamar. Apabila penjualan anggur itu produsen khamar.
- h) Jual beli yang bergantung pada syarat. Seperti ungkapan pedagang: “jika tunai harganya Rp. 10.000,- dan jika berhutang harganya Rp. 15.000,-.
- i) Jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.<sup>42</sup>
- j)

---

<sup>41</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Semarang: IAIN Walisongo, 2002), h.136-138

<sup>42</sup> M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, h.129

## 5. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur ulama. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli *shahih* dan jual beli *fasid*, sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi menjadi tiga, yaitu *shahih*, *fasid*, dan batal.<sup>43</sup>

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang di dalam Islam, Wahbah Az-zuhaili meringkasnya sebagai berikut:

### a. Terlarang sebab *Ahliyah* (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli di kategorikan *shahih* apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu ber *tasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut ini.

#### 1) Orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila tidak sah. Berdasarkan kesepakatan ulama, karena tidak memiliki sifat *ahliyah* (kemampuan) dan disamakan dengannya orang yang pingsan, mabuk dan dibius.

#### 2) Anak kecil

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah jual beli anak *mumayyiz* yang

---

<sup>43</sup> Rachmat Syafei, *Op.Cit.*, h.93

belum *baligh*, tidak sah sebab tidak ada *ahliyah* (kecakapan hukum).

Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabillah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan oleh walinya. Mereka beralasan salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli, juga sekaligus pengamalan atas firman Allah Swt:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ  
أَمْوَالَهُمْ ....

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”. (Q.S. Annisa:6).<sup>44</sup>

### 3) Orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur ulama jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama syafi’iyyah, jual beli orang buta itu tanpa diterangkan sifatnya dipandang bati dan tidak sah karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan baik walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

---

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h.80

4) Orang yang terpaksa

Menurut ulama Hanfiyah, hukum jual beli orang terpaksa, seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizing pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyyah, tidak lazim, baginya ada *khiyar*. Adapun menurut ulama syafi'iyah dan Hanabilla, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

5) *Fudhul*

Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli semacam ini diperbolehkan, karena mereka menafsirkan jual beli tersebut kepada pembelian untuk dirinya dan bukan orang lain. Menurut ulama yang lain mengkategorikan ini ke dalam jual beli untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa jual beli *fudhul* tidak sah.

6) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros)

Maksud dari terhalang disini adalah karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghambur-hamburkan hartanya, menurut pendapat ulama

Malikiyyah, Hanfiyah dan pendapat paling *shahih* dikalangan Hanabilah, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.<sup>45</sup>

Begitu pula ditangguhkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum menurut ulama Malikiyah dan hanafiyah. Sedangkan menurut ulama syafi'iyah dan Hanabilah jual beli tersebut tidak sah.

Menurut jumhur selain malikiyah, jual beli orang sakit parah yang sudah mendekati mati hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya (*tirkah*), dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut ditangguhkan kepada izin ahli warisnya. Menurut ulama mallikiyah, sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah dan lain-lain.

#### 7) Jual beli *mulja'*

Jual beli *mulja'* adalah jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

---

<sup>45</sup> Rachmat Syafei, *Op.Cit.*, h.94

**b. Terlarang sebab lafadz (ijab qabul)**

Ulama *fiqih* telah sepakat atas sahnyanya jual beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul, berada disatu tempat, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul, berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh pemisah.<sup>46</sup>

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1) Jual beli *mu'athah*

Jual *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab qabul*. Jumhur ulama mengatakan sah apabila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan ijab-qabul dengan isyarat, perbuatan, atau cara lain yang menunjukkan keridhaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai sighat dengan perbuatan atau isyarat.

Adapun ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa jual beli harus disertai ijab-qabul, yakni dengan sighat lafadzh, sebab keridhaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual beli dengan isyarat, bagi orang yang uzur.

---

<sup>46</sup> Rachmat Syafei, *Op.Cit.*, hal.95

Jual beli *al-mu'athah* dipandang tidak sah menurut ulama Hanfiah, tetapi sebagian ulama syafi'iyah membolehkannya seperti imam Nawawi. Menurutnya, hali itu dikembalikannya dalam hal-hal kecil.<sup>47</sup>

2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama *fiqih* bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ketangan yang dimaksud.

3) Jual Beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati ke sahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

4) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad

Ulama *fiqh* sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah, sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).

---

<sup>47</sup> Rachmat Syafei, *Op.Cit.*, hal.96

5) Jual beli tidak bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi jika lebih baik, seperti meninggikan harga. Menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama syafi'iyah menganggapnya tidak sah.<sup>48</sup>

6) Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang *fasid* menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama.

7) Jual beli *najasyi*

Jual beli *najasyi* yaitu jual beli yang dilakukan dengan menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena akan menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak diri).

---

<sup>48</sup> Rachmat Syafei, *Op.Cit.*, hal.97



Hal ini sesuai dengan Hadist Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ  
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
عَنِ التَّجَشُّ. (رواه البخاري ومسلم)<sup>49</sup>

Artinya: “Diceritakan Abdullah bin Maslamah, diceritakan Malik dari Nafi’i dari Bin Umar r.a berkata bahwa: “Rasulullah Saw telah melarang telah melarang jual beli *najasyi*”. (H.R. Bukhari Muslim)

8) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain

Contoh dari perbuatan menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain adalah apabila seseorang berkata: “jangan terima tawaran orang itu, nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi”. Jual beli seperti itu dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan diantara pedagang dengan pembeli dan pembeli dengan pembeli.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Shahih Bukhori* (No.Hadits 2011, h.813

<sup>50</sup> A. Khumedi Ja’far, *Op.Cit.*, h.158

Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ:  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخِيهِ. (رواه البخاري ومسلم)<sup>51</sup>

Artinya: “Diriwayatkan Ismail berkata menceritakan Malik dari Nafi’ dari Abdullah Bin Umar r.a berkata: Rasulullah Saw bersabda: “tidak boleh menjual untuk merusak penjualan kawannya”. (H.R. Bukhari Muslim)

**c. Terlarang sebab *Ma’qud Alaih* (barang yang diperjual belikan)**

Secara umum, *ma’qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasa disebut *mabi’* (barang jualan) dan harga.

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma’qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara’.

---

<sup>51</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op.Cit.*, h.812

Selain itu ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama yang lainnya, di antaranya sebagai berikut:

1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.<sup>52</sup>

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan maksudnya adalah jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung terbang di udara atau ikan yang ada di air, dipandang tidak sah karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

3) Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَا دِعْنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ

رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ. (رواه

أحمد)

---

<sup>52</sup> Rachmat Syafei, *Op.Cit.*, hal.97

Artinya: “ Mewartakan Muhammad bin samak dari Yazid bin Abi Ziyad dari Al-Musayyabin rafi’ dari Abdullah bin Mas’ud katanya: telah bersabda Rasulullah Saw, jangan kamu beli ikan yang berada di dalam air, karena itu adalah sesuatu yang tidak jelas”. (HR. Ahmad).<sup>53</sup>

4) Jual beli barang najis dan terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis seperti *khamar*. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedang ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.<sup>54</sup>

5) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah *fasid*, sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia. Jual beli *majhul* adalah jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih di dalam tanah, jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga, dan lain-lain.<sup>55</sup>

6) Jual beli *muzabanah*

---

<sup>53</sup> Maktabu Syamilah, Sunan Al-Kubro Lil Baihaqi, *Bab Tamrin Bay'I Fadhlil Ma'I Ladzi Yakunu Bil Falati Wa Yahtaju Ilaihi Yar'I kala'I Tahrim Mani Badlaili Wa Tahrimu Bay'I Dhirobi Al-Fahli*, juz: 8, tt, hal.3494

<sup>54</sup> Rachmat Syafei, *Op.Cit.*, hal.98

<sup>55</sup> A. Khumedi Ja'far, *Op.cit.*, h.151

Jual beli *muzabanah* yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering. Misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedang ukurannya sama sehingga akan merugikan pemilik kering. Jual beli seperti ini dilarang, hal ini sebagaimana hadits Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ  
الْمُزَابَنَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ كَيْلًا، وَبَيْعِ الزَّيْبِ بِالْكَرْمِ كَيْلًا.  
(رواه البخاري ومسلم)<sup>56</sup>

Artinya: “Diceritakan Ismail diceritakan Malik dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar r.a berkata: “ Rasulullah Saw melarang penjualan *muzabanah*, yaitu menjual buah di pohon dengan tamar yang jelas berat timbangannya, dan menjual kismis dengan anggur yang masih di pohon”. (H.R. Bukhari Muslim)

#### 7) Jual beli *muhaqqalah*

Jual beli *muhaqqalah* yaitu jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau kebun atau di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur-unsur riba di dalamnya.

#### 8) Jual beli *mukhadharah*

---

<sup>56</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op.Cit.*, No. Hadits 2039, h.820

Jual beli *mukhadharah* adalah jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena barang tersebut masih samar (belum jelas) dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiup angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

9) Jual beli *mulammasah*

Jual beli *mulammasah* adalah jual beli secara menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.<sup>57</sup>

10) Jual beli *munabadzah*

Jual beli *munabadzah* adalah jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata: “lemparkanlah padaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula padamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.

---

<sup>57</sup> A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h.154

Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: يُنْهَى عَنْ صِيَا مَيْنٍ وَ  
بَيْعَتَيْنِ، الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَلُمْلَامَسَةٍ وَالْمُنَا بَذَّةٍ (رواه البخاري  
ومسلم)<sup>58</sup>

Artinya: “ Abu Hurairah r.a berkata: Nabi Muhammad Saw melarang dua macam puasa dan dua macam jual beli. Yaitu puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, jual beli dengan cara menyentuh dan melempar”. (H.R. Bukhari Muslim)

## 6. Landasan Jual Beli Barang Tiruan Dalam Islam

### a. Fatwa Nomor 7966

Fatwa Nomor 7966, Pertanyaan: Saya bekerja sebagai satpam di salah satu kantor pemerintahan. Ada seseorang kontraktor yang mendatangkan air untuk kantor ini dengan menggunakan mobil tangki, empat tangki pada setiap bulannya, sesuai dengan kesepakatan dengan kantor tersebut, dengan harga yang telah ditentukan setiap kali datang. Pihak kontraktor ini meminta saya supaya membuatkan laporan setiap bulan yang menyebutkan bahwa telah dilakukan pengiriman air empat kali kedatangan, disertai hari dan tanggal. Dengan menyebutkan pula harga yang harus dibayar untuk keempat

---

<sup>58</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op.Cit.*, h.759

kali kedatangan tersebut. Kantor ini tidak selalu membutuhkan air yang telah ditetapkan.

Terkadang dalam satu bulan, kontraktor ini sama sekali tidak mengisikan air, karena kantor memang tidak memerlukannya. Dan pada bulan lain tidak mengisikan air kecuali hanya satu kali saja. Tetapi dia meminta kami agar memberikan keterangan bahwa telah menerima pengiriman penuh sebanyak empat kali, dengan demikian dia akan menerima pembayarannya. Saya takut berdosa memberikan keterangan yang dianggap sebagai bukti tersebut. Selain itu saya juga takut menjadi penolong bagi kontraktor tersebut untuk memakan apa yang tidak halal baginya.

Sementara itu dia (kontraktor) tidak mau menerima keterangan yang menyebutkan kurang dari empat kali datang dalam satu bulan. Ada beberapa orang yang berusaha memberi Pengertian kepada saya bahwa keadaan seperti itu terjadi di banyak kantor. Kontraktor-kontraktor lainnya di kantor ini menangani bagian lainnya. Hanya saja, saya tidak merasa tenang dengan hal tersebut dan sangat takut menjadi penipu bagi diri saya sendiri dan kantor ini serta bagi kontraktor yang tidak mau menerima dari saya kecuali hanya itu saja.

Jawaban: Anda tidak boleh berbuat curang atau dan anda tidak akan bebas dari tanggung jawab melainkan menjelaskan realitas dari jumlah pengiriman air pada setiap bulannya. Jika anda menyalahi kenyataan tersebut berarti anda telah melakukan penipuan terhadap



kantor tempat anda bekerja, juga berdosa karena bantuan yang anda berikan kepada kontraktor untuk melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran serta memakan harta dengan cara yang tidak benar. Allah Ta'ala telah berfirman:

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥٩﴾

Artinya: ....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya. (Q.S. Al-Maidah: 2)<sup>59</sup>

#### b. Hadits Bukhari Muslim

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَقَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بَرَكٌ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: “Ada hadits yang semakna dari hadist Hakim bin Hizam Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Rasulullah Saw bersabda, dua orang yang berjual beli mempunyai hak pilih selagi belum saling berpisah atau beliau bersabda hingga keduanya saling berpisah jika keduanya saling jujur dan menjelaskan maka keduanya diberkahi dalam jual beli

<sup>59</sup> Syaikh Ahmad bin Abdurrazzaq Ad-Duawaisy, *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Imam syafi,i, 2009), h.223-224

itu, namun jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka barakalah jual beli itu dihapuskan”. (H.R. Bukhari Muslim)<sup>60</sup>

**c. Larangan menjual barang tiruan dengan menyembunyikan cacat barang**

Larangan berbuat tadlis (penipuan/ menyembunyikan cacat barang). Tadlis adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Tadlis dalam bermuamalah khususnya dalam jual beli adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut, yang termasuk tadlis antara lain adalah menjual barang yang tidak asli dengan yang semestinya, dan jual beli tersebut sebagaimana hadis Rasulullah Saw. “Tidaklah Halal penjualan ijon, tidak pula dua syarat yang bertentangan dalam suatu transaksi penjualan dan tidak ada penjualan atas suatu yang tidak ada padamu.”<sup>61</sup>

**d. Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim**

Hadist ke-987

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمرَ، أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ يُخَذَّعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَافَ

<sup>60</sup> Mardani, *Ayat-Ayat daan Hadis Ekonomi syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h.104

<sup>61</sup> M. A. Manan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik* (Jakarta: Intermasa, 1992), h. 210-211

Artinya: Abdullah bin Umar Meriwayatkan bahwa ada seseorang laki-laki menceritakan kepada Nabi kalau ia tertipu dalam jual beli. Beliau pun bersabda: “Jika kamu jual beli, katakanlah, “Tidak Penipuan”. (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>62</sup>

**e. Fatwa Nomor 7623**

Pertanyaan: Ada seorang muslim membeli alarm yang rusak salah satu komponennya, kemudian ia mengganti komponen ini dengan yang baru, sehingga berjalan seperti sedia kala. Perlu diketahui, pembelian alarm ini belum lebih dari Sembilan bulan, selanjutnya dia menawarkan alarm ini untuk dijual dengan harga lebih rendah dari harga di pasaran, yaitu seharga 5 pound. Apakah dia harus menjelaskan kepada pembeli bahwa dia sudah mengganti salah satu komponennya ataukah sudah cukup hanya dengan harga karena sudah pernah dipakai?

Jawaban: Yang wajib dia lakukan adalah menjelaskan keadaan barang yang dijual dan tidak menyembunyikan cacatnya jika penggantian komponen tersebut dianggap sebagai cacat oleh orang yang mengerti.<sup>63</sup>

**f. Fatwa Nomor 6092 (Pemalsuan dalam Jual Beli)**

Pertanyaan: Jika memungkinkan untuk membuat kurma ruthab buatan (dari segi warna), yaitu dengan memanaskannya,

---

<sup>62</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'Lu Wal Marjan*, Tim Penerjemah Aqwam (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2013), h. 678

<sup>63</sup> Syaikh Ahmad bin Abdurrazzaq Ad-Duawaisy, *Op.Cit.*, h. 224-225

apakah yang demikian itu diperbolehkan. Perlu diketahui, maksud dari hal tersebut adalah agar segera basah supaya dapat dijual mahal.

Jawaban: Hal itu tidak boleh dilakukan, sebab di dalamnya mengandung unsur pemalsuan, yaitu memperlihatkan kurma muda itu tidak pada wujud yang sebenarnya.<sup>64</sup>

## B. Khiyar

Dalam melaksanakan jual beli, terdapat hak khiyar bagi kedua pihak yang berakad. Beberapa hal yang perlu diketahui di antaranya:

### 1. Pengertian khiyar

Kata *Al-khiyar* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan *Al-Khiyar* dikemukakan oleh ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi. Sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.<sup>65</sup>

Pengertian *Khiyar* menurut ulama fiqh adalah:

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاقِدِ الْحَقُّ فِي إِمضَاءِ الْعَقْدِ أَوْ فسخِهِ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ رُخْيَارُ  
شَرْطُ أَوْرُؤْسَةٍ أَوْ عَيْبٍ أَوْ أَنْ يَخْتَارَ أَحَدُ الْبَيْعَيْنِ إِنْ كَانَ لَخِيَارُ رُخْيَارُ  
تَعْيِينِ<sup>66</sup>

Artinya: “Suatu keadaan yang menyebabkan aqid (orang yang akad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya yakni menjadikan atau

<sup>64</sup> Syaikh Ahmad bin Abdurrazzaq Ad-Duawaisy, *Op.Cit.*, h. 233

<sup>65</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h.129

<sup>66</sup> Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz IV (Libanon: Daar Al-Fiqr Beirut, 1989), h.250

membatalkannya jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar syarat* atau *khuyar aib*, *khiyar ru'yah* atau hendaklah memilih diantara dua barang jika *khiyar tayin*.

Secara terminologi, *al-khiyar* menurut Sayyid Sabiq adalah:

الْخِيَارُ هُوَ طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْإِمْضَاءِ أَوْ الْإِلْغَاءِ<sup>67</sup>

*Khiyar* adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau meninggalkan (jual beli).

*Khiyar* secara *Syar'i* adalah hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara *syar'i* yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad.<sup>68</sup> Definisi *khiyar* dalam kompilasi hukum ekonomi Syariah pasal 20 ayat 8 adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.<sup>69</sup>

Ahmad Ahzar Basyir mengatakan *Khiyar* ialah memilih mana yang lebih baik bagi seseorang antara dua hal atau lebih.<sup>70</sup> Menurut Hamzah Ya'qub, *khiyar* adalah adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi meneruskan atau membatalkan transaksi.<sup>71</sup>

Dari beberapa definisi tersebut Ahmad Wardi Muslich menyimpulkan bahwa *khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli

<sup>67</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h.100

<sup>68</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op.Cit.*, h.99

<sup>69</sup> KHES., pasal 20 Tentang Akad

<sup>70</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1990), h.81

<sup>71</sup> Hamzah Yaqub, *Fiqh Mu'amalah; Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1992), h.101

atau membetalkannya. Karena ada cacat pada barang yang dijual atau pada perjanjian pada waktu akad karena sebab yang lain tujuan diadakannya *khiyar* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.<sup>72</sup>

## 2. Dasar Hukum *khiyar*

Berikut ini adalah beberapa dalil yang menjelaskan tentang *khiyar*:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَا  
رٍ مَلَمَّ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرَوْا رُبَّمَا قَالَ أَوْ يَكُونُ يَبْعُ خِيَا  
رٍ (رواه البخاري ومسلم)<sup>73</sup>

Artinya: “Meriwayatkan Abu Nu’am, meriwayatkan Hamad bin Zaidin, meriwayatkan Ayyub dari Ibnu Umar r.a berkata bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda: “dua pihak yang saling jual beli. Salah satunya menggunakan hak memilih (*khiyar*) terhadap pihak lain selama keduanya belum berpisah kecuali mengenai jual beli dengan *khiyar*”. (H.R. Bukhari Muslim)

<sup>72</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 216-217

<sup>73</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Shahih Bukhari*, Juz II Terjemahan Ahmad Sunarto (Surabaya: Al-Hidayah) No.hadits 1981, h.802

Terdapat pula hadits yang diriwayatkan Imam Bukhori dari Ishaq bin Mansur:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَا رِمَالُمَا يَتَفَرَّقَانِ صَدَقَ وَبَيْنَا بُورُكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْنَهُمَا<sup>74</sup>

Artinya: “Dari Abdullah bin Al-harits ia berkata: saya mendengar hakim bin Hizam r.a dari Nabi Saw beliau bersabda: “penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan di dalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua”. (H.R. Al-Bukhari)

### 3. Macam-macam khiyar

*Khiyar* itu sendiri boleh bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyar ash-sharath* dan *khiyar at-ta'yyin*, ada pula *khiyar* yang bersumber dari shara', seperti *khiyar al-'aib*, *khiyar ar-ru'yah* dan *khiyar al-majlis*. Berikut akan dikemukakan pengertian masing-masing *khiyar*.<sup>75</sup>

#### a. *Khiyar al-majlis*

Yang dimaksud dengan *khiyar al-majlis* yaitu hak pilih bagi kedua pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya

<sup>74</sup> Imam Bukhari, Shohih Bukhari, Hadits shohih Nomor 1968, (Lidwah Pustaka-Kitab Sembilan Imam)

<sup>75</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h.130

masih berada dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. *Khiyar* seperti hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.<sup>76</sup> Dasar hukum adanya *Khiyar al-majlis* ini adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang sudah disebutkan pada dasar hukum *khiyar* di atas.

Terkait keabsahan *Khiyar al-majlis* ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa masing-masing pihak yang melakukan akad berhak mempunyai *khiyar al-majlis* selama mereka masih dalam majelis akad. Sekalipun akad telah sah dengan adanya *ijab* (ungkapan penjual dari penjual) dan *qabul* (ungkapan beli dari pembeli), selama keduanya masih dalam majelis akad, maka masing-masing pihak berhak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli itu, karena akad jual beli ketika itu dianggap masih belum mengikat. Akan tetapi, apabila setelah *ijab* dan *qabul* masing-masing pihak tidak menggunakan hak *khiyar*-nya mereka berpisah badan, maka jual beli itu dengan sendirinya menjadi pengikat, kecuali apabila masing-masing pihak sepakat menyatakan bahwa keduanya masih berhak dalam jangka waktu tiga hari untuk

---

<sup>76</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h.131



membatalkan jual beli itu. Alasan yang mereka kemukakan adalah hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al- Bukhori diatas.

b. *Khiyar al-ta'yin*

Maksud dari khiyar al-ta'yin yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh adalah dalam pembelian kacamata, misalnya ada yang berkualitas super dan berkualitas sedang. Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana kacamata yang super dan mana kacamata yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan bantuan pakar kacamata dan spesialis dokter mata *khiyar* seperti ini, menurut ulama Hanafiyah adalah boleh. Dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seseorang ahli nya. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyar al-ta'yin* diperbolehkan.<sup>77</sup>

Akan tetapi, jumhur ulama fiqih tidak menerima keabsahan *khiyar al-ta'yin* yang dikemukakan ulama Hanafiyah ini. Alasan mereka, alasan mereka dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan harus jelas, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dalam persoalan khiyar al-ta'yin, menurut mereka

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, h.131-132

kelihatan bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas. Oleh sebab itu, ia termasuk kedalam jual beli al-ma'dum (tidak jelas identitasnya) yang dilarang syara'.<sup>78</sup>

Ulama Hanfiyah yang membolehkan khiyar al-ta'yyin, mengemukakan tiga syarat untuk sahnya khiyar al-ta'yyin ini, yaitu:<sup>79</sup>

- 1) Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya.
- 2) Barang itu berbeda sifat dan nilainya.
- 3) Tenggang waktu untuk khiyar al-ta'yyin itu harus ditentukan, yaitu menurut Imam Abu Hanifah tidak lebih dari tiga hari. Khiyar al-ta'yyin menurut ulama Hanafiah hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.

c. *Khiyar Ash-sharth*

Maksud dari khiyar ash-sharth adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Misalnya, pembeli mengatakan “saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama satu minggu.”<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, h.132

<sup>79</sup> Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah; Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.126

<sup>80</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h.132

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa khiyar ini diperbolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Khiyar ash-sharh, menurut mereka hanya berlaku dalam transaksi yang mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang dan *rahn* (jaminan hutang). Untuk transaksi yang sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak seperti hibah, pinjam meminjam, perwakilan (wakalah) dan wasiat, khiyar seperti ini tidak berlaku. Tenggang waktu dalam khiyar asy-syarth, menurut jumhur ulama fiqh harus jelas. Apabila tenggang waktu khiyar tidak jelas atau bersifat selamanya, maka khiyar tidak sah.<sup>81</sup>

d. *Khiyar al-'aib*

*Khiyar al-'aib* adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad. Apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.<sup>82</sup>

Misalnya, seseorang membeli jeruk satu kilogram, kemudian dua buah diantaranya sudah busuk atau ketika dibuka sudah berlendir dan tidak segar lagi. Hal ini sebelumnya belum diketahui baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus seperti ini, menurut para ahli fiqh ditetapkan hak *khiyar* bagi pembeli.<sup>83</sup> Dan seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Aisyah r.a bahwa

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Op.Cit.*, h.118

<sup>83</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h.136

seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri di dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada rasul maka budak itu dikembalikan kepada penjual.<sup>84</sup>

Dasar hukum *khiyar al-‘aib* ini adalah sebagai berikut:

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ يَبِعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيْنَهُ<sup>85</sup>

Artinya: “Sesama muslim itu bersaudara: tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang itu terdapat aib atau cacat”. (H.R. Ibnu Majah dan dari ‘Uqbah bin Amir).

Penyebab *khiyar al-‘aib* adalah adanya cacat barang yang di perjualbelikan (*ma’qud alaih*) atau harga (*tsaman*), karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang yang akad tidak meneliti kecacatannya ketika akad.<sup>86</sup> *Khiyar al-‘aib* ini, menurut kesepakatan ulama fiqih, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang di perjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*.<sup>87</sup>

Cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*, menurut para ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para

<sup>84</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h.84

<sup>85</sup> Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Hadist Shohih Nomor 2237, (Lidwah Pustaka – Kitab Sembilan Imam).

<sup>86</sup> Rachmat Syafei, *Op.Cit.*, h.116

<sup>87</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h.136

pedagang. Tetapi menurut Malikiyah dan Syafi'iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan daripadanya.<sup>88</sup>

e. *Khiyar al-ru'yah*

Khiyar ar-ru'yah yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Jumhur Ulama Fiqih yang terdiri atas ulama hanafiyah, Malikiyah, hanabilah dan zahiriyah menyatakan bahwa khiyar al-ru'yah di syariatkan dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَاهُ<sup>89</sup>

Artinya: “Siapa membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak *khiyar* apabila telah melihat barang itu”. (H.R. Al-Daruqutniy dari Abu Hurairah).

Akad seperti ini menurut mereka boleh terjadi disebabkan obyek yang akan dibeli itu tidak ada di tempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng (Sardencis). Khiyar al-ru'yah menurut mereka mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli.

Akan tetapi ulama Syafi'iyah dalam pendapat baru (al-madhab al-jadid), mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.*, h.137

tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu menurut mereka khiyar al-ru'yah tidak berlaku. Karena akad itu mengandung unsur penipuan yang bisa membawa kepada perselisihan. Jumhur ulama mengemukakan beberapa syarat berlakunya *khiyar al-ru'yah*, yaitu:<sup>90</sup>

- 1) Obyek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung.
- 2) Obyek akad itu berupa materi, seperti tanah, rumah dan kendaraan.
- 3) Akad itu sendirinya mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa-menyewa apabila ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, menurut Jumhur ulama maka khiyar al-ru'yah tidak berlaku. Apabila akad itu dibatalkan berdasarkan khiyar al-ru'yah, menurut jumhur ulama pembatalan harus memenuhi syarat-syarat bahwa pertama hak *khiyar* masih berlaku bagi pembeli, yang kedua bahwa pembatalan itu tidak berakibat merugikan penjual, seperti pembatalan hanya dilakukan pada sebagian obyek yang dijualbelikan dan pembatalan itu diketahui pihak penjual.

Menurut jumhur ulama, khiyar al-ru'yah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:<sup>91</sup>

- 1) Pembeli menunjukkan kerelaannya melangsungkan jual beli, baik melalui pernyataan atau tindakan.

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, h.138

<sup>91</sup> *Ibid.*

- 2) Objek yang di jualbelikan hilang atau terjadi tambahan cacat, baik oleh kedua belah pihak yang berakad, orang lain, maupun oleh sebab alami.
- 3) Terjadinya penambahan materi obyek setelah dikuasai oleh pembeli, seperti di tanah yang dibeli itu telaah dibangun rumah, atau kambing yang dibeli itu telah beranak. Akan tetapi apabila penambahan itu menyatu dengan obyek jual beli, seperti susu kambing yang dibeli atau pepohonan yang dibeli itu berbuah, maka khiyar al-ru'yah bagi pembeli tidak gugur.
- 4) Orang yang memiliki hak khiyar meninggal dunia, baik sebelum melihat obyek yang dibeli maupun sesudah dilihat, tetapi belum ada pernyataan kepastian membeli daripadanya. Akan tetapi berkenaan dengan apakah nanti hak khiyar al-ru'yah ini boleh diwariskan atau tidak kepada ahli waris, ada beberapa pendapat jika menurut ulama Hanfiah dan Hanabilah, khiyar al-ru'yah tidak boleh diwariskan kepada ahli waris, namun menurut ulama Malikiyah boleh diwariskan. Oleh karenanya hak khiyar belum langsung gugur dengan wafatnya pemilik hak itu, tetapi diserahkan kepada ahli warisnya, apakah akan dilanjutkan jual beli itu setelah melihat obyek yang diperjualbelikan atau akan dibatalkan.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, h.138-139

### C. Jual Beli Barang Tiruan Menurut Hukum Positif

#### 1. Pengertian dan Dasar hukum jual beli

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>93</sup> Agar mampu memahami jual beli dan aspek-aspeknya menurut ketentuan hukum positif, terlebih dahulu akan dijelaskan Pengertian jual beli. Jual beli menurut Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bila sebelum penyerahan suatu piutang yang telah dijual, debitur membayar utangnya kepada penjual, maka hal itu cukup untuk membebaskan debitur.<sup>94</sup>

Dari Pengertian yang diberikan Pasal 1457 di atas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu:<sup>95</sup>

- a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- b. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.<sup>96</sup> Di dalam perjanjian itu pihak penjual

---

<sup>93</sup> R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), h.366

<sup>94</sup> *Ibid.*, h.370

<sup>95</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), h.181



berkewajiban untuk menyerahkan objek jual kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.<sup>97</sup> Unsur yang terkandung dalam definisi tersebut adalah:

- a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga.
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu, setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli. Jual beli menurut Prof. R. Subekti adalah jual beli sebagai perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak tersebut.<sup>98</sup>

Unsur-unsur pokok jual beli berdasarkan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah setelah orang-orang tersebut sepakat tentang benda dan harganya, meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Berdasarkan asas

---

<sup>96</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h.49

<sup>97</sup> *Ibid.*, h.50

<sup>98</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h.2

*konsedualisme* tersebut, ditegaskan bahwa perjanjian lahir dan mengikat cukup dengan kata sepakat saja dan sudah dilahirkan pada saat detik tercapainya *consensus* sebagaimana dimaksudkan dalam pasal tersebut, sehingga bukan pada detik sebelumnya maupun sesudahnya.<sup>99</sup>

## **2. Beberapa cara memperoleh hak merek suatu barang**

Sistem perolehan hak merek yang berkaitan dengan perlindungan hak merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah sistem konstitutif. Sistem konstitutif memiliki keunggulan yakni: Kepastian hukum untuk menentukan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi.

Cukup dilihat siapa yang lebih dahulu memperoleh *filing date* atau terdaftar dalam daftar umum merek, tidak menimbulkan kontroversi antara pemakai pertama dengan pendaftar pertama, dan pembuktian didasarkan pada dokumen yang bersifat autentik. Maka untuk menarik dugaan hukum jauh lebih sederhana dibanding dengan sistem deklaratif. Hal ini berdampak positif atas penyelesaian sengketa, yakni penyelesaian jauh lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>100</sup>

## **3. Penggunaan Secara Iktikad Baik**

Jika merek digunakan oleh dua pihak, maka persoalan hukumnya (legal problem) bukan lagi tentang “persamaan pada pokoknya” atau “persamaan secara keseluruhan”, tetapi harus ditentukan siapa yang menggunakan merek dengan iktikad baik dalam pasar. Dalam kasus

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, h.3

<sup>100</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trade Mark): Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2015), h.96-97

tersebut, penggunaan merek Time Out oleh Sarah melalui pengapalan pertama pada September 1973 menetapkan hak yang terlebih dahulu atas penggunaan merek Time Out. Merek yang digunakan harus dengan iktikad baik dan bukan “*mere use adoption a mark without bonafide use in attempt to reserve a mark* (sekadar mengadopsi merek tanpa penggunaan yang dapat dipercaya dan hanya sekadar upaya untuk menahan pasar)”.<sup>101</sup>

Untuk lebih jelasnya, Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama mengemukakan penggunaan iktikad secara baik yaitu sebagai berikut:

- g. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum
- h. Memiliki daya pembeda
- i. Belum menjadi milik umum
- j. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan.<sup>102</sup>

#### **4. Tujuan Perlindungan Konsumen**

- k. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- l. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan/ jasa.
- m. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, h.133

<sup>102</sup> Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Intellectual Property Rights* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.349

- n. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- o. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab berusaha.
- p. Meningkatkan kualitas barang dan/ jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>103</sup>

## **5. Hak, Kewajiban dan Perlindungan Konsumen**

- a. Secara garis besar hak-hak konsumen dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:<sup>104</sup>
  - 1) Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
  - 2) Hak untuk memperoleh barang dan/ atau jasa dengan harga yang wajar.
  - 2) Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Oleh karena ketiga hak/ prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen. Sehingga dapat dijadikan/ merupakan prinsip

---

<sup>103</sup> Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

<sup>104</sup> Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan di atas harus di penuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.<sup>105</sup>

Bob Widyaharto juga menyebutkan bahwa deklarasi hak konsumen yang dikemukakan oleh John F. Kennedy tanggal 15 Maret 1962, menghasilkan empat hak dasar konsumen (The Four Consumer Basic Rights) yang meliputi hak-hak sebagai berikut:<sup>106</sup>

- 1) Hak untuk mendapat dan memperoleh keamanan atau The Right to be Secured
- 2) Hak untuk memperoleh informasi atau The Rights to be Informed
- 3) Hak untuk memilih atau The Right to Choose
- 4) Hak untuk didengarkan atau The Right to be Heard

b. Kewajiban Konsumen, adalah:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

---

<sup>105</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.47

<sup>106</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta Selatan: Visi Media, 2008), h.24

- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>107</sup>

c. Perlindungan Konsumen

Yang berbunyi:

- 1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor, apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan agen atau perwakilan produsen luar negeri.
- 2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Subtansi Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah tepat dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen. Sebagaimana diketahui Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya tertuju pada pelaku usaha yang menjalankan usahanya di Indonesia, dan karenanya importir harus bertanggung jawab sebagai pembuat barang impor atau sebagai penyedia jasa asing.<sup>108</sup>

## 6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

a. Hak pelaku usaha, adalah:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan.

---

<sup>107</sup> Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

<sup>108</sup> Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik.
  - 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
  - 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.
  - 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Kewajiban pelaku usaha, adalah:
- 1) Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
  - 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
  - 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
  - 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
  - 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.

- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>109</sup>

## 7. Penyelesaian Sengketa

Disebutkan tentang gugatan ganti rugi yang dikatakan bahwa:

- 1) Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
  - a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
  - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
- 2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.<sup>110</sup>

Jika pelanggaran hak itu semata-mata terhadap hak yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor Merek 2001, maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai peristiwa perbuatan melawan hukum (Vide Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Tetapi jika pelanggaran itu menyangkut perjanjian lisensi, dimana para pihak dalam perjanjian itu tidak memenuhi isi perjanjian itu baik seluruhnya atau sebagian, maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai gugatan dalam

---

<sup>109</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, h.51-52

<sup>110</sup> Pasal 76 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001



peristiwa wanprestasi (Vide Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Dalam UU Merek No. 15 Tahun 2001 diterapkan bahwa ada dua macam bentuk atau isi dari tuntutan gugatan tersebut, yaitu:

- a. Berupa permintaan ganti rugi.
- b. Penghentian Pemakaian merek.

Ganti rugi itu dapat pula berupa ganti rugi materil dan ganti rugi immaterial. Ganti rugi materil yaitu berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Misalnya akibat pemakaian merek oleh pihak yang tidak berhak tersebut menyebabkan produk barangnya menjadi sedikit terjual oleh karena konsumen membeli produk barang yang menggunakan merek palsu yang diproduksi oleh pihak yang tidak berhak tersebut. Jadi secara kuantitas barang-barang dengan merek yang sama menjadi banyak beredar di pasaran.

Sedangkan ganti rugi immaterial yaitu berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moril. Misalnya pihak yang tidak berhak atas merek tersebut memproduksi barang dengan kualitas (mutu) yang rendah, untuk kemudian berakibat kepada konsumen sehingga ia tidak mengkonsumsi produk yang dikeluarkan oleh pemilik merek yang bersangkutan.

Dengan ditentukannya Pengadilan Niaga sebagai lembaga Peradilan Formal untuk gugatan yang bersifat keperdataan, maka terbuka

kesempatan luas kepada pemegang merek untuk mempertahankan haknya, tanpa pembatalan lembaga Peradilan seperti pada Undang-Undang yang lama. Apalagi setelah jelas bahwa hak merek ini adalah bagian dari hukum benda, dan tentu tidak akan berbeda dengan tuntutan dalam hukum benda lainnya. Peristiwanya juga adalah peristiwa perdata yaitu berkisar tentang peristiwa perbuatan melawan hukum atau peristiwa wanprestasi.<sup>111</sup>

Persoalannya kemudian mengapa tuntutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 UU Merek, peristiwa tersebut dikategorikan perbuatan melawan hukum, dan tuntutan yang didasarkan pada Pasal 77 dan Pasal 78 (sepanjang mengenai kewajiban pemegang lisensi) dikategorikan dalam peristiwa wanprestasi. Alasannya adalah bahwa peristiwa yang diatur dalam Pasal 76, lahirnya hak dan kewajiban didasarkan atas Undang-undang, tidak dengan perjanjian. Sedangkan peristiwa yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 lahirnya hak dan kewajiban atas dasar suatu perjanjian lisensi.

Oleh karena itu, sepanjang mengenai tuntutan ganti rugi yang didasarkan kepada kedua peristiwa di atas berlaku pula ketentuan yang termuat dalam KUHPerdata, yang disebut terakhir ini berfungsi sebagai *Lex Generalis*. Sedangkan UU Merek Tahun 2001 sendiri berfungsi sebagai *Lex Specialis*.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Intellectual Property Rights* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.401

<sup>112</sup> *Ibid.*, h.401-402

Menurut Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul Hukum Positif Indonesia (Hal 56), sebagaimana ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, yaitu:

- 1) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
- 2) Ketentuan-ketentuan *Lex Specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *Lex Generalis*
- 3) Ketentuan-ketentuan *Lex Specialis* harus berbeda dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *Lex Generalis*.

Mengacu kepada asas hukum *Lex specialis derogate Lex generalis* (aturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan yang lebih umum), dengan telah diaturnya tindak pidana pemalsuan merek dalam UU Merek (*Lex specialis*).

Menurut *Conditio Sine Quanon* (Von Buri) mengemukakan teori yang terkandung dalam Pasal 481 KUHPidana (*Lex generalis*) tidak dapat diterapkan dalam perkara pemalsuan merek, termasuk dalam kasus penjualan dan pembelian sepatu tiruan antara penjual dan konsumen. Selain harus membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam

membeli dan menyimpan barang palsu, penegak hukum juga harus membuktikan bahwa barang palsu tersebut diperoleh dari kejahatan.<sup>113</sup>

Unsur yang diperoleh dari kejahatan dalam Pasal 481 KUHP tidak dapat diterapkan kepada sepatu tiruan yang dianggap diperoleh dari tindakan pemalsuan merek. Selain karena membutuhkan proses hukum tersendiri untuk menetapkan suatu barang merupakan barang palsu atau bukan, juga karena penafsiran menyangkut pemalsuan merek tidak dapat mengesampingkan Undang-Undang Merek sebagai *Lex specialis* dalam perkara merek, yang telah secara tegas mengatur bahwa pemalsuan merek merupakan pelanggaran dan bukan kejahatan (pasal 90 sampai dengan pasal 94 ayat 2 Undang-Undang Merek).

## 8. Ancaman Pidana

Tuntutan pidana dalam tiap delik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Merek ini adalah merupakan hak negara. Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, tuntutan pidana ini juga dimaksudkan sebagai suatu bukti bahwa hak merek itu mempunyai ciri hak kebendaan (hak absolut). Pihak yang tidak berhak yang mencoba atau melakukan gangguan terhadap hak tersebut akan diancam dengan hukuman pidana.

Berbeda dengan hak perorangan seperti hak yang terbit dari perjanjian sewa menyewa, misalnya, disana tidak terdapat ancaman pidana jika si penyewa misalnya tidak bersedia mengosongkan rumah jika masa sewanya telah berakhir. Atau jika si penyewa belum melunasi uang sewa.

---

<sup>113</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: Alumni, 1999), h. 8

Oleh karena hak-hak yang disebut terakhir ini adalah hak perorangan, maka tuntutanannya lebih banyak bersifat perdata, terkecuali dalam pemenuhan prestasi itu ada unsur-unsur pidananya. Misalnya terdapat unsur penipuan dan lain sebagainya.

UU Merek No 15 Tahun 2001 menggolongkan delik dalam perlindungan hak merek ini sebagai delik kejahatan, dan delik pelanggaran. Selain delik pelanggaran yang secara tegas disebut dalam Pasal 94, selebihnya adalah delik kejahatan, termasuk penggunaan indikasi asal sebagaimana diatur dalam Pasal 93. Itu berarti pula bahwa terhadap percobaan untuk melakukan delik yang digolongkan dalam delik kejahatan tetap diancam dengan hukuman pidana (Vide Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).<sup>114</sup>

Adapun ancaman pidana yang dimaksudkan tersebut, Sebagai berikut: Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,-.<sup>115</sup> Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan

---

<sup>114</sup> *Ibid.*, h.402

<sup>115</sup> Pasal 90 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,-.<sup>116</sup>

Harus diperhatikan pula bahwa ancaman pidana itu bersifat kumulatif bukan alternatif. Jadi disamping dikenakan ancaman penjara kepada pelaku juga dikenakan ancaman hukuman berupa denda. Sebab kalau hanya denda Rp 1.000.000.000,-. Atau Rp 800.000.000,-. Barangkali para pelaku tidak berkeberatan tetapi ancaman penjara dan tuntutan ganti rugi perdata dimaksudkan pula untuk membuat si pelaku menjadi jera (tujuan preventif) dan orang lain tidak mengikuti perbuatannya.

Untuk delik yang dikategorikan dalam delik pelanggaran dimuat dalam Pasal 94, yang berbunyi, barang siapa memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui atau patut diketahui, bahwa barang dan jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,-. Ancaman hukuman yang dimuat dalam Pasal ini bersifat alternatif, dapat berupa hukum kurungan saja atau membayar denda saja.<sup>117</sup>

Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. mengemukakan: Bahwa pasal 90 dan 91 Undang-Undang Merek ditinjau dari pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 53 KUHPidana merupakan suatu hal yang tidak membedakan hal kesengajaan dari hal kurang berhati-hati, melainkan hanya mengatakan bahwa haruslah ada kesalahan (*Schuld*) di pihak

---

<sup>116</sup> Pasal 91 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001

<sup>117</sup> Ok. Saidin, *Op.Cit.*, h.402-403

pembuat perbuatan hukum, agar si pembuat itu dapat diwajibkan membayar ganti kerugian.

Dari uraian diatas yang telah dikemukakan oleh Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. mengaitkan bahwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>118</sup>

- a. Harus ada perbuatan, yang dimaksud perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya bersifat setiap langkah laku tidak berbuat. Dalam hal ini perbuatan tersebut adalah pemakaian merek pihak lain tanpan hak atau tanpa persetujuan pemilik merek asli.
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum; Dalam hal ini secara jelas bahwa perbuatan memakai merek pihak lain tanpa sah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001.
- c. Ada Kerugian; Dalam hal ini jelas sekali terlihat kerugian yang dialami pemilik merek asli baik itu kualitas, asset maupun keuntungan dan juga opini masyarakat.
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Bagian ini perlu dibuktikan dengan menghadirkan bukti-bukti mengakibatkan kerugian bagi pemilik sah merek.

---

<sup>118</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata* (Bandung: Mandar maju, 2000), h. 13





### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Tempat Penelitian Toko Sepatu Feetland Bandar Lampung**

###### **1. Sejarah Singkat Toko Feetland**

Toko Feetland merupakan tempat penjualan sepatu yang terbilang memiliki banyak peminat di Bandar Lampung. Toko Feetland berdiri 5 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2012. Toko Feetland didirikan oleh Bapak Yudi sekaligus pemilik toko Feetland saat ini. Pada awalnya toko ini didirikan hanya sebatas toko kecil-kecilan saja dengan luas sebidang tanah 20m<sup>2</sup>, dimana saat itu pemilik toko bapak Yudi mengatakan bahwa modal pertama untuk mendirikan toko tersebut hanya dengan tiga juta rupiah dengan beberapa pasang sepatu yang dijual serta untuk menyewa bangunan toko sebesar tiga ratus ribu rupiah dalam pertahun. Pemberian nama toko Feetland merupakan ide dari pemilik toko itu sendiri, dikarenakan nama tersebut belum ada yang memakai dan terdengar unik untuk toko sepatu.<sup>1</sup>

Pada awalnya, toko Feetland hanya menjual beberapa macam tipe sepatu saja dan tidak lengkap, namun seiring berkembangnya toko tersebut dan makin ramai pembeli, toko Feetland tersebut menjual sepatu dengan lebih banyak macam tipe. Hingga yang tadinya toko tersebut dikelola sendiri oleh pemilik toko, kini toko tersebut sudah memakai tenaga karyawan untuk membantu mengelola toko tersebut di bagian kasir,

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Yudi Rahmat Fandi, Pemilik dan Pengelola Toko Feetland, Bandar Lampung, 10 November 2017

penjaga toko, sekaligus pelayan untuk pembeli. Serta yang tadinya luas bangunan hanya 20m<sup>2</sup>, kini sudah menjadi 72m<sup>2</sup>.

Alasan tersebut yang melatarbelakangi berdirinya Toko Feetland. Dengan ide dan inisiatif pemilik toko untuk membuka usaha toko sepatu karena pemilik toko beranggapan membuka usaha toko sepatu sangat menjanjikan karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mempunyai barang sepatu baik untuk bergaya (fashion) maupun untuk kebutuhan olahraga.<sup>2</sup>

## 2. Lokasi Toko Feetland Bandar Lampung

Lokasi toko Sepatu Feetland berada di jalan Hayam Wuruk No. 93 kelurahan Kebun Jeruk, Kecamatan Tanjung Karang Timur kota Bandar Lampung. Toko Feetland terletak di tengah- tengah pemukiman penduduk dan berada di tepi jalan raya. Bangunan toko Feetland didirikan diatas tanah 72m<sup>2</sup>, luas tempat parkir hanya 8m<sup>2</sup> namun terbilang cukup luas untuk toko sepatu.

Toko Feetland terletak dipinggir jalan raya dan juga dekat dengan pusat perbelanjaan seperti pasar Tugu Bandar Lampung dan Mall Chandra Tanjung Karang. Oleh karena itu letak toko Feetland sangat strategis dan mudah ditemukan.<sup>3</sup>

---

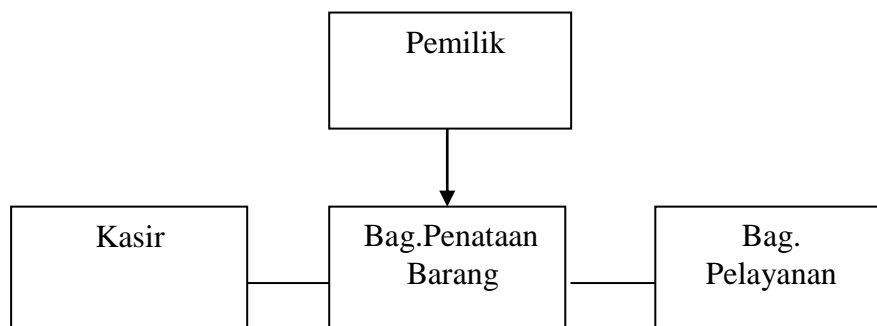
<sup>2</sup> Wawancara dengan Yudi Rahmat Fandi, Pemilik dan Pengelola Toko Feetland, Bandar Lampung, 10 November 2017

<sup>3</sup> Wawancara dengan Yudi Rahmat Fandi, Pemilik dan Pengelola Toko Feetland, Bandar Lampung, 10 November 2017

### 3. Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja Toko Feetland

Gambar 1.

Struktur Organisasi Toko Feetland



Keterangan:

- Pemilik dan penanggung jawab adalah Bapak Yudi R. fandi yang memimpin dan bertanggung jawab penuh atas kelancaran dan memantau perkembangan toko Feetland.
- Kasir adalah Ratna Sari, yang juga sebagai pengelola yang berkaitan dengan keuangan, seperti untuk belanja makan siang untuk karyawan lain yang termasuk ibu anna yulia tersebut.
- Bagian Penataan Barang yaitu ibu Dewi Ratna selain bertugas untuk menata barang ibu haliza juga sebagai penata barang di gudang.
- Bagian Pelayanan/pemasaran adalah ibu Okta Apriyani yang bertugas untuk melayani setiap pengunjung yang datang ke toko.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ratna Sari, Karyawan Toko Feetland, Bandar Lampung, 10 November 2017

## 4. Daftar harga sepatu di Toko Feetland Bandar Lampung

Gambar 2.

Daftar Harga Sepatu

No.	Tipe	Jenis	Harga (Rupiah)
1.	Jawpaw	Olahraga ekstrim, dan olahraga air	300.000
2.	Ax 1 Hiking Shoes	Outdour	270.000
3.	Runneo Zetroc Mens Casual Shoes	Running	250.000
4.	Sersan 86	Skate	150.000
5.	F 10 Adizero	Football	200.000

Sumber: Hasil Wawancara

Dari daftar harga serta tipe dan jenis sepatu di atas, penanggung jawab pemilik toko Feetland menjelaskan bahwa sepatu yang di jualnya berbeda harga dengan sepatu yang original hingga selisih 30%-50% (imitasi) dari harga yang asli nya 100% (original). Di contohkan seperti Sepatu Adidas tipe Jawpaw yang harga aslinya 899.000 Rupiah namun pemilik toko menjual sepatu tipe tersebut dengan harga 300.000 Rupiah.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Yudi Rahmat Fandi, Pemilik dan Pengelola Toko Feetland, Bandar Lampung, 10 November 2017

## **B. Gambaran Tempat Penelitian Toko Adidas Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung**

### **1. Sejarah Singkat Toko Adidas Mall Boemi Kedaton**

Kota Bandar Lampung semakin bertambah semarak dengan kehadiran pusat perbelanjaan baru Mall Boemi Kedaton yang terletak di sudut persimpangan Jl. Teuku Umar dan Jl. Sultan Agung. Mall Boemi Kedaton dibuka sekaligus melaksanakan soft opening pada tanggal 12 Juli 2014 (Sabtu) yang ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh walikota Bandar Lampung Drs. H. Herman HN., MM. Pada soft opening ini tampak beberapa outlet sudah siap beroperasi seperti Chandra Supermarket dan J.CO Donuts.

Begitu juga dengan toko Adidas, toko Adidas berdiri di dalam Mall Boemi Kedaton tidak lama setelah pembukaannya Mall Boemi Kedaton tersebut, yaitu 3 tahun lalu, tepatnya pada 26 Juli 2014 yang diketangung jawabkan oleh pak Hasan selaku pengelola. Toko Adidas ini menjual semua sepatu serta ada beberapa alat olahraga bermerek Adidas, dan semua sepatu dan barang lain yang dijual merupakan barang original.

### **2. Lokasi Toko Adidas Mall Boemi Kedaton**

Lokasi toko Adidas Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung berada di jalan Teuku Umar No.1 Kedaton kota Bandar lampung.<sup>6</sup> Toko Adidas Mall Boemi Kedaton terletak di tengah- tengah perkotaan Bandar

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Hasan, Penanggung Jawab Toko Adidas Mall Boemi Kedaton, Bandar Lampung, 11 November 2017

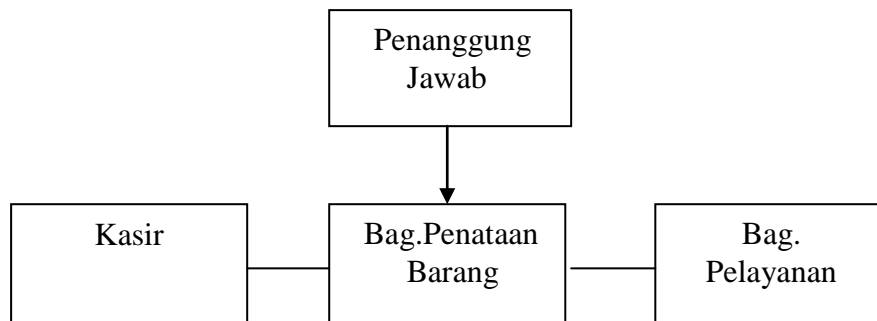
Lampung, dan berada di tepi jalan raya. Bangunan toko Adidas didirikan diatas tanah 84m<sup>2</sup>.

Mall Boemi Kedaton terletak dipinggir jalan raya, tepatnya antara perbatasan jalan Sultan Agung dengan jalan Teuku Umar yang merupakan pertengahan kota Bandar lampung. Dan juga dekat dengan pusat perbelanjaan lainnya. Oleh karena itu letak toko Adidas mall Boemi Kedaton sangat strategis dan mudah ditemukan.

### 3. Struktur Organisasi dan Pembagian kerja Toko Adidas Mall Boemi Kedaton

Gambar 3.

Struktur Organisasi Toko Feetland



Keterangan:

- a. Penanggung jawab adalah Bapak Hasan yang memimpin dan bertanggung jawab penuh atas kelancaran dan memantau perkembangan toko Adidas Mall Boemi Kedaton, bapak Hasan mengatakan bahwa ia sebagai penanggung jawab di toko Adidas Mall Boemi Kedaton yang diamanahkan dari pemilik toko tersebut, yaitu Perusahaan Adidas Indonesia.

- b. Kasir adalah Husna windi, yang juga sebagai pengelola yang berkaitan dengan keuangan, seperti untuk belanja makan siang untuk karyawan lain yang termasuk ibu Husna Windi tersebut.
- c. Bagian Penataan Barang yaitu Bapak Eki Sunandar.
- d. Bagian Pelayanan/pemasaran adalah ibu Yati yang bertugas untuk melayani setiap pengunjung yang datang ke toko.<sup>7</sup>

Eki Sunandar selaku karyawan toko mengatakan walau ada pembagian suatu sistem kerja organisasi teknis di lapangan, kerja dilakukan secara kerja team.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Hasan, Penanggung Jawab Toko Adidas Mall Boemi Kedaton, Bandar Lampung, 11 November 2017

<sup>8</sup> Wawancara dengan Eki Sunandar, Karyawan Toko Adidas Mall Boemi Kedaton, Bandar Lampung, 11 November 2017

4. Daftar harga sepatu di Toko Adidas Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung

Gambar 4.

Daftar Harga Sepatu

No.	Tipe	Jenis	Harga (Rupiah)
1.	Jawpaw	Olahraga ekstrim, dan olahraga air	899.000
2.	Ax 1 Hiking Shoes	Outdour dan Adventure	750.000
3.	Runneo Zetroc mens casual shoes	Running	510.000
4.	Sersan 86	Skate	569.000
5.	F 10 Adizero	Football	629.000

Sumber: Hasil wawancara



Dari daftar harga serta tipe dan jenis sepatu di atas, penanggung jawab toko Adidas Mall Boemi Kedaton menjelaskan bahwa semua sepatu yang di jualnya original.<sup>9</sup>

### **C. Praktik Jual Beli Sepatu Merek Adidas**

#### **1. Asal Barang Tiruan Sepatu Merek Internasional Adidas**

Tutum Rahanta Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menuturkan, bahwa keberadaan barang palsu saat ini sudah menjadi rahasia umum di Indonesia. Keberadaannya pun tentunya menjadi ancaman bagi penjual produk bermerek asli. Bagaimana tidak, harga yang ditawarkan untuk produk palsu jatuh lebih murah jika dibandingkan dengan produk asli.

Hasan selaku pemilik toko Feetland mengatakan bahwa barang sepatu yang dijualnya berasal dari Negara China dan dari dalam negeri khususnya di daerah Bekasi. Ia mengatakan harga sepatu yang ia dapat sama murahanya namun ia mengatakan bahwa lebih banyak mengambil barang yang dia jual berasal dari Negara China. Selain itu beberapa toko yang menjual barang sepatu tiruan yang serupa mengatakan bahwa barang yang ia jual pun sama berasal dari Negara China dan dalam Negeri.

Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 250 juta adalah pasar yang menggiurkan untuk bisnis apapun, termasuk bisnis barang palsu. Berdasarkan studi masyarakat Indonesia Anti-Pemalsuan (MIAP) dan UI,

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Hasan, Penanggung Jawab Toko Adidas Mall Boemi Kedaton, Bandar Lampung, 11 November 2017

kerugian didapat karena perdagangan barang palsu di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 65,1 Triliun pada pertengahan 2017.

Adapun nilai kerugian yang dialami seluruh dunia akibat barang palsu lebih fantastis lagi. Berdasarkan laporan Organisation For Economic Co-operation and Development (OECD), total impor barang palsu pada 2016 mencapai 6 Triliun.

Dari total tersebut sebanyak 66 persen barang palsu berasal dari China. Kemudian disusul dari dalam negeri 34 persen. Suburnya barang palsu tidak lepas dari kemampuan atau daya beli masyarakat Indonesia serta rendahnya kesadaran masyarakat atas hukum cipta.

## **2. Praktik jual beli sepatu Adidas di toko Feetland Bandar Lampung**

Sepatu merek Adidas merupakan sepatu bermerek internasional terbesar di Eropa dan juga terbesar kedua di dunia. Merek Adidas sudah beredar di negara-negara maju dan negara berkembang, sepatu Adidas yang dijual di Toko sepatu Feetland Bandar Lampung salah satunya. Toko sepatu Feetland menjual sepatu-sepatu di toko nya yang 80% merek Adidas dan 20% merek selain Adidas. Pemilik toko sepatu Feetland Bandar Lampung mengatakan sepatu-sepatu yang di jual di tokonya diimpor dari Negara cina dan juga dari produsen di daerah bekasi, semua sepatu-sepatu tersebut merupakan barang tiruan atau imitasi.<sup>10</sup>

Ada beberapa tingkatan barang imitasi yaitu:

- a. Kw *Grade Ori*/ Kw Super Premium

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Yudi Rahmat Fandi, Pemilik dan Pengelola Toko Feetland, Bandar Lampung, 10 November 2017

Kw *Grade Ori* yaitu suatu barang yang di produksi langsung dari perusahaan aslinya namun tidak lulus untuk edar di pasaran, sejenis barang *reject*.

b. Kw Super AAA

Barang yang kelasnya masih di bawah *Grade Ori*, hanya saka secara penampilan berhasil meniru dan mirip. Namun bahan yang digunakan lebih murah, misalnya barang asli menggunakan kulit domba maka barang Kw Super AAA menggunakan kulit sapi.

c. Kw Super

Barang ini hanya meniru bagian luar saja, tidak pada bagian dalam, misalkan sepatu asli di dalamnya berbahan beludru namun Kw Super berbahan kanvas biasa.

d. Kw Semi Super

Kw Semi Super ini barang yang banyak diganti bahannya, misalnya kulit domba diganti dengan kulit sapi. Penggunaan kulit sapi itu juga tidak dipakai semua bagian barangnya.

e. Kw 1

Kw 1 merupakan barang yang memiliki kualitas di bawah Kw Semi Super. Kw 1 fokus pada bentuk yang dibuat agar mirip namun tidak memperhatikan kualitas bahan. Misalnya sepatu olahraga, jika yang asli bisa bertahan sampai setahun tetapi Kw 1 hanya bisa bertahan sampai 2 bulan saja.

## f. Kw 2

Kw 2 merupakan tingkatan barang imitasi yang terbawah, barang yang digunakan menggunakan bahan yang murah. Kw 2 sangat jauh dari barang yang asli bahkan tingkat kemiripannya sudah terlihat berbeda hanya dengan melihat sekilas saja. Barang-barang itu sengaja dipilih untuk menahan biaya produksi.

Dari jenis dan tingkatan barang imitasi diatas, pemilik toko Feetland mengatakan bahwa sepatu Adidas yang dijual di tokonya hanya menjual sepatu imitasi Kw Semi Super dan Kw Super saja. Pemilik toko beralasan apabila ia menjual barang imitasi Kw 1 dan Kw 2 konsumen akan berkurang serta apabila ia menjual Kw Super AAA dan Kw *Grade Ori* harganya lebih mahal serta barang tidak selalu ada dan stabil di penjualan dan itu akan mempengaruhi jumlah peminat.<sup>11</sup>

Pelaksanaan transaksi jual beli yang diterapkan pada toko sepatu Feetland tidak jauh berbeda dengan dengan toko sepatu lainnya. Konsumen yang datang akan memilih sendiri sepatu yang dibutuhkan dan yang diinginkan dengan menanyakan harganya. Ketika konsumen bertanya kepada penjual tentang kondisi sepatu tersebut maka penjual akan mempersilahkan pada pembeli untuk melihat sendiri kondisi dan bentuk sepatunya lalu penjual menyebutkan jenis, dan tipe sepatunya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Yudi Rahmat Fandi, Pemilik dan Pengelola Toko Feetland, Bandar Lampung, 10 November 2017

<sup>12</sup> Wawancara dengan Yudi Rahmat Fandi, Pemilik dan Pengelola Toko Feetland, Bandar Lampung, 10 November 2017

Jual beli sepatu di toko Feetland terjadi apabila kedua belah pihak sudah sepakat dengan pembicaraan antara penjual dan pembeli mengenai harga. Jika harga sudah cocok antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli maka terjadilah akad. Dengan kata lain kedua belah pihak telah berikrar adanya jual beli (*ijab qabul*). Tetapi kesepakatan tersebut berdasarkan kemauan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan antara keduanya, baik mengenai harga maupun kewajiban yang harusnya dipenuhi dalam jual beli tersebut. Termasuk di dalamnya adalah kesepakatan dalam pembayaran, permintaan barang dan segala hal yang berkaitan dengan transaksi jual beli sepatu tersebut. Hal ini sesuai dengan istilah jual beli yaitu suatu tindakan yang dilakukan antara penjual dan pembeli, dimana pihak penjual memberikan barang dagangannya kepada pembeli, dan pembeli menerima dengan membayar sejumlah uang, baik langsung maupun tidak langsung sebagai imbalan atau ganti atas barang yang dibelinya secara suka sama suka dan saling rela.

Penjualan sepatu di toko Feetland, penjual tidak memberi informasi terlebih dahulu terhadap pengunjung atau pembeli bahwa sepatu yang dijual merupakan barang imitasi. Tetapi penjual akan mengatakan sepatu yang dijualnya barang imitasi apabila pembeli bertanya akan hal tersebut. Namun pemilik toko menjelaskan apabila adanya suatu complain tentang sepatu yang dibelinya karena adanya suatu cacat yang tidak diketahui dan juga menukar sepatu karena ukuran yang tidak pas maka

sepatu boleh di kembalikan atau ditukar dengan sepatu yang lain dengan syarat jangka waktu tidak lebih dari tiga hari setelah pembelian.

Beberapa pengalaman seperti yang terjadi pada saudara Dedi berstatus mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Lampung Utara untuk membeli sepatu dari toko sepatu Feetland. Ia mengatakan bahwa belum tau dan memahami sebelumnya bahwa sepatu yang akan dibelinya waktu itu merupakan barang imitasi. Saudara Dedi tau dan mengetahui barang tersebut imitasi setelah bertanya kepada penjual “mengapa harga sepatunya murah?”. Ketika tau sepatu merupakan barang imitasi, pengunjung tersebut tetap ingin membeli barang yang akan dipilihnya karna sepatu-sepatu tersebut terlihat bagus.<sup>13</sup> Cara pembayaran dilakukan langsung ditempat secara tunai melalui kasir dan juga dapat melalui gesek Anjungan Tunai Mandiri BCA.

Pemilik toko sepatu Feetland menjelaskan bahwa terjadinya complain bahwa sepatu yang dibeli oleh konsumen rusak dibagian jahitan dan perekat sepatu serta tukar ukuran sepatu, maka sepatu dapat ditukar atau dikembalikan dalam jangka waktu 3 hari. Namun apabila kerusakan diluar kriteria tersebut maka penukaran barang tidak dibolehkan.

selain hal tersebut para pengunjung yang membeli sepatu di toko feetland Bandar lampung mengatakan lebih memilih sepatu imitasi atau barang tiruan di bandingkan sepatu yang asli (Original). Para pembeli sepatu di toko Feetland mengaku bahwa dia lebih menyukai sepatu imitasi

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Dedi, Pembeli di Toko Feetland, Bandar Lampung, 10 November 2017

karena beralasan, sepatu imitasi terkesan mirip dengan barang yang aslinya dan juga lebih murah dibandingkan dengan sepatu yang asli (original). Selain itu para pembeli memilih sepatu imitasi karena keinginan rasa gengsi yang tinggi, lalu berpendapat bahwa jika memakai barang bermerek terkenal dapat menambahkan rasa percaya diri walau sejatinya barang yang dipakai tersebut adalah imitasi.

Peneliti akan memaparkan pendapat-pendapat konsumen atau pembeli tentang praktik penjualan di toko sepatu Feetland dengan jumlah narasumber yang telah diwawancarai oleh peneliti, yaitu sebanyak 5 orang. Penjelasanannya adalah sebagai berikut:

1. Faruq Al Qindy mengatakan:

Praktik penjualan di toko Feetland sudah cukup baik. Hal ini karena pelayanannya yang ramah dan mengayomi pengunjung apabila bertanya Tanya tentang sepatu yang dijual.<sup>14</sup>

2. Dedi Saputra mengatakan:

Bahwa penjualan sepatu di toko Feetland mempunyai sepatu yang bagus dan harganya tidak terlalu mahal.<sup>15</sup>

3. Heru Fitranto mengatakan:

Pernah menjadi salah satu konsumen toko Feetland yang mengatakan praktik jual beli sepatu di toko Feetland lumayan memuaskan karena di toko sepatu Feetland ia bisa memilih sepatu dengan cara mencoba

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Faruq Al-Qindy, Pembeli di Toko Feetland, Bandar Lampung, 10 November 2017

<sup>15</sup> Wawancara dengan Dedi saputra, Pembeli di Toko Feetland, Bandar Lampung, 10 November 2017

sepatu tersebut berkali-kali sampai menemukan yang cocok tanpa harus tergesa-gesa memillih.<sup>16</sup>

4. Arifudin Zukhri mengatakan:

Jual beli yang dilakukan di toko Feetland cukup baik seperti umumnya orang berjualan. Ia pernah menukar sepatu yang dia beli karena lantaran tidak muat ukuran sepatu dengan ukuran orang yang ingin memakainya.<sup>17</sup>

5. Igam Kurniawan mengatakan:

Praktik penjualan sepatu di toko Feetland baik karena banyak pilihan sepatu dan modelnya serta harganya tidak mahal.<sup>18</sup>

### **3. Praktik jual beli sepatu Adidas di toko Adidas Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung**

Sepatu merek Adidas merupakan sepatu bermerek Internasional terbesar di Eropa dan juga terbesar kedua di dunia. Merek Adidas sudah beredar di negara-negara maju dan negara berkembang, sepatu Adidas yang dijual di Toko Adidas Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung salah satunya. Toko ini menjual barang-barang beremerek Adidas yang 100% original, sepatu-sepatu yang dijual di toko Adidas Mall Boemi Kedaton

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Heru Fitranto, Pembeli di Toko Feetland, Bandar Lampung, 10 November 2017

<sup>17</sup> Wawancara dengan Arifudin Zukhri, Pembeli di Toko Feetland, Bandar Lampung, 12 November 2017

<sup>18</sup> Wawancara dengan Igam Kurniawan, Pembeli di Toko Feetland, Bandar Lampung, 12 November 2017



Bandar Lampung menjual harga sepatu yang telah ditentukan dari Perusahaan Adidas Indonesia (Pusat).<sup>19</sup>

Transaksi jual beli yang diterapkan pada toko Adidas Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung. Pengunjung yang datang langsung di sambut oleh karyawan di depan pintu toko dan pengunjung dipersilahkan untuk memilih sendiri sepatu yang dibutuhkan dan yang diinginkan. Pengunjung di toko Adidas berbeda dengan pengunjung di toko Feetland, jika di toko Feetland pengunjung ataupun konsumen bertanya tentang kondisi, jenis, tipe, dan harga sepatu menyebutkan jenis, namun di toko Adidas Mall Boemi Kedaton pengunjung hanya menanyakan tipe dan jenisnya saja.

Terjadinya akad jual beli apabila kedua belah pihak sudah sepakat dengan pembicaraan dari pengunjung bahwa ia telah memilih sepatu yang dipilihnya. Kesepakatan tersebut berdasarkan kemauan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan antara keduanya, baik mengenai harga maupun kewajiban yang harusnya dipenuhi dalam jual beli tersebut, termasuk di dalamnya adalah kesepakatan dalam pembayaran, permintaan barang dan segala hal yang berkaitan dengan transaksi jual beli sepatu tersebut.

Cara pembayaran dilakukan langsung cash ditempat, secara tunai melalui kasir dan juga dapat melalui gesek Anjungan Tunai semua Bank. Hal ini karena perusahaan Adidas telah bekerja sama hampir dengan semua Bank di Indonesia. Bapak Hasan selaku penanggung jawab toko Adidas Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung menjelaskan bahwa belum

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Eki Sunandar, Karyawan di Toko Feetland, Bandar Lampung, 11 November 2017

pernah ada yang complain tentang terjadinya kerusakan sepatu ataupun yang lainnya. Hal ini karena sebelum terjadinya akad pengunjung sudah memilih dan mempertimbangkan sepatu yang akan dipilih dan untuk masalah kualitas barang belum ada yang complain karena barang yang dijual merupakan barang Adidas yang original yang sudah teruji kualitasnya.<sup>20</sup>

Peneliti akan memaparkan pendapat-pendapat pengunjung atau konsumen tentang praktik penjualan di toko Adidas Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung. Dengan jumlah narasumber yang telah diwawancarai oleh peneliti, yaitu sebanyak 4 orang. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Dita Agustin mengatakan:

Praktik penjualan di toko Adidas Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung sangat baik, karena toko Adidas sudah jelas menjual produk Sepatu merek Adidas yang asli tanpa harus takut adanya barang palsu.<sup>21</sup>

2. Aqil Setiawan:

Praktik penjualan di toko Adidas Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung Profesional karna tempatnya yang bagus, karyawannya yang supel, dan barang-barang yang dijual bagus.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Hasan, Penanggung Jawab Toko Adidas Mall Boemi Kedaton, Bandar Lampung, 11 November 2017

<sup>21</sup> Wawancara dengan Dita Agustin, Pembeli di Toko Adidas Mall Boemi Kedaton, Bandar Lampung, 11 November 2017

<sup>22</sup> Wawancara dengan Aqil Setiawan, Pembeli di Toko Adidas Mall Boemi Kedaton, Bandar Lampung, 11 November 2017

3. Yogi Hernanda mengatakan:

Jual beli yang dilakukan di toko Adidas Mall Boemi Kedaton untuk pelayanan dan sistem pembayaran dll tidak bermasalah, dan walaupun harganya mahal tetapi sesuai dengan kualitas barangnya yang asli.<sup>23</sup>

4. Aditia kurniawan:

Jual beli yang dilakukan di toko Adidas Mall Boemi Kedaton sangat tertata rapih dari pelayanan dan tempatnya dan juga sudah jelas bahwa barang yang dijual asli semuanya tanpa terkecuali.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Wawancara* dengan Yogi Hernanda, Pembeli di Toko Adidas Mall Boemi Kedaton, Bandar Lampung, 11 November 2017

<sup>24</sup> *Wawancara* dengan Aditia Kurniawan, Pembeli di Toko Adidas Mall Boemi Kedaton, Bandar Lampung, 11 November 2017



## **BAB IV**

### **ANALISA DATA**

#### **A. Analisis Praktik Jual Beli Sepatu Merek Internasional Adidas Pada Toko Sepatu Feetland Bandar Lampung dan Toko Adidas Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung**

Setelah penulis mengumpulkan data, baik yang penulis dapat dari perpustakaan maupun dari lapangan yang kemudian dituangkan dalam penyusunan pada bab-bab terdahulu, maka pada bab ini sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisis data yang telah penulis kumpulkan. Jual beli barang (sepatu) tiruan yang terjadi di toko sepatu Feetland dan jual beli sepatu Adidas original di toko Adidas Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung merupakan sistem jual beli yang dilakukan secara langsung di tempat dan dilakukan oleh orang-orang (penjual dan pembeli) yang sudah dewasa. Transaksi jual beli ini diawali oleh pengunjung yang mendatangi toko untuk melihat serta memilih sepatu yang terpajang di toko.

Praktik jual beli sepatu tiruan bermerek Adidas yang terjadi pada toko Feetland Bandar Lampung dan jual beli sepatu Adidas yang original di toko Adidas Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung bila dilihat dari kualitas dan harga barang jauh berbeda. salah satu contoh yaitu bila penjualan harga sepatu Adidas original dijual dengan harga 1.000.000 Rupiah, harga sepatu tiruannya bisa dijual dengan harga 300.000 Rupiah. Hal ini sesuai dengan kualitas barangnya yang apabila sepatu digunakan dengan sama kadar pemakaiannya, sepatu Adidas original bisa bertahan dalam jangka waktu dua tahun, sedangkan sepatu tiruannya hanya dapat bertahan sekitar lima

bulan saja. Dari dua pilhan kualitas dan harga sepatu tersebut, para pengunjung di dua toko yang berbeda itu melakukan pembelian atas rasa suka dan keinginannya sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak lain.

Adanya ketidak jelasan kondisi sepatu di Toko Feetland Bandar Lampung, yaitu penjual tidak memberikan informasi terlebih dahulu terhadap pembeli atau pengunjung tentang tipe dan jenis sepatu yang dijual sebelum adanya pertanyaan dari pihak pengunjung, serta minimnya pengetahuan karyawan tentang klasifikasi sepatu yang dijual. Hal ini berbeda dengan penjualan sepatu di Toko Adidas Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung karena sepatu di toko tersebut telah tertera tipe dan jenis sepatunya sehingga pengunjung dapat mengetahui langsung tanpa harus bertanya lagi kepada penjual. Menyikapi permasalahan ini, seharusnya penjual Sepatu di Toko Feetland lebih menguasai tentang klasifikasi tipe dan jenis sepatu agar dapat meyakinkan dan memberikan kejelasan kepada pengunjung yang datang.

Selain itu penjualan sepatu di Toko Feetland tidak mengatakan terlebih dahulu terhadap pengunjung atau pembeli bahwa status sepatu yang dijual merupakan barang imitasi atau tiruan. Tetapi penjual akan mengatakan sepatu yang dijualnya barang tiruan apabila pembeli bertanya akan hal tersebut. Penjual di Toko Feetland beranggapan tidak perlu mengatakan kepada pengunjung bahwa barang yang dijual tidak *original* karena pengunjung sudah paham sepatu yang dijualnya merupakan barang tiruan. Seharusnya dalam hal ini pihak Toko Feetland menerangkan

terhadap pembeli akan status barang sepatu yang dijual karena belum tentu semua pembeli mengetahui akan informasi tersebut serta agar adanya suatu keadilan berupa kerelaan antara kedua belah pihak dan hak-hak konsumen dalam jual beli.

Sebagian besar pengunjung dan pembeli di toko Adidas Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung berasal dari kalangan orang-orang yang ekominya menengah hingga menengah ke atas. Dan di toko Feetland Bandar Lampung pengunjung yang bersinggah serta konsumen yang membeli sepatu di toko tersebut mayoritas kalangan masyarakat menengah dan menengah ke bawah. Dari sekian pengunjung dan pembeli, jumlah pengunjung yang sudah mengetahui bahwa sepatu di toko Feetland itu barang tiruan lebih banyak dibanding yang tidak mengetahui hal tersebut. Para konsumen beranggapan memakai sepatu yang dibeli di toko Feetland menambahkan rasa percaya diri karna merek Adidas tertera di sepatu tersebut serta harga sepatu yang terjangkau.

**B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Barang Tiruan Sepatu Merek Internasional Adidas di Toko sepatu Feetland Bandar Lampung dan Toko Adidas Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung**

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh, bahwa jual beli barang sepatu tiruan pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, serta tidak ada dalil Al-Quran dan Hadits yang menyebutkan hukum dari jual beli sepatu tiruan, namun pada permasalahan ini barang tiruan nya yang menjadi

objek yang ada hukum dasarnya bagi penjualan barang tiruan. Berbeda menurut Hukum Positif yang sudah ada hukum khusus yang membahas tentang barang tiruan yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Merek.

Praktik jual beli sepatu tiruan merek Adidas yang terjadi di toko Feetland Bandar Lampung bila dilihat dari segi objek, rukun dan syarat jual beli dalam hukum ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

#### 1. Segi Objeknya

Objek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli di toko Feetland yaitu sebagai berikut:

##### a. Suci atau bersih barangnya

Ajaran Islam melarang melakukan jual beli barang yang mengandung unsur najis, minuman keras, daging babi, bangkai (kecuali ikan di laut dan belalang) dan sebagainya. Begitu juga halnya dengan jual beli sepatu tiruan di toko Feetland Bandar Lampung bahwa sepatu tersebut barang yang bersih. Sebagaimana yang terkandung dalam kaidah fiqih telah sebutkan bahwa jual beli hukum asalnya adalah mubah selama tidak terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya. Jadi, walaupun sepatu tersebut belum bisa dipastikan 100% suci namun barang tersebut bisa dikategorikan barang yang suci karna bahannya yang menggunakan bahan tekstil melainkan bukan bahan yang sudah terlihat najisnya.



b. Dapat dimanfaatkan

Barang yang diperjual belikan harus mempunyai manfaat, sehingga pihak yang membelinya tidak merasa dirugikan. Dalam jual beli ini sepatu tiruan bermerek Adidas di toko Feetland Bandar Lampung objek yang di perjual belikan bermanfaat bagi pembeli karena dapat dipakai untuk melindungi kaki dari berbagai aktifitas sehari-hari.

c. Milik orang yang melakukan akad

Barang sepatu yang ada di toko Feetland sudah diketahui dimiliki secara keseluruhan oleh pemilik toko Feetland.

d. Barang yang diakadkan ada di tangan dan dapat diketahui

Artinya bahwa perjanjian yang menjadi objek perjanjian jual beli harus benar-benar berada di bawah kuasa pihak penjual. Sehingga jual beli dapat dilakukan langsung secara melihat dan memilih barang milik penjual yang ada.

Dalam hal ini jual beli di toko Feetland memenuhi syarat-syarat karena telah memenuhi kriteria, yaitu: suci atau bersih barangnya, harus dapat dimanfaatkan, barang itu hendaklah dimiliki oleh orang yang berakad, berkuasa menyerahkan barang itu, barang itu dapat diketahui, dan barang yang di transaksikan ada di tangan.

Dari Objek yang terkandung dalam hukum Islam di atas, terdapat persamaan di dalam perjanjian jual beli Hukum Positif

(perdata). Di dalam perjanjian itu jelas kepemilikan benda dari pihak penjual serta adanya suatu benda yang dijual dan diketahui, dan benda yang dapat dimanfaatkan. Tetapi dalam hukum positif belum adanya objek atau persyaratan benda yang dijual harus suci atau bersih barangnya.

## 2. Rukun

Melihat dari ketentuan rukun tentang jual beli di toko Feetland Bandar Lampung, telah ada objek jual beli berupa sepatu dan juga nilai tukar barang yang berupa uang serta sudah adanya orang yang berakad, yaitu penjual sebagai pemilik harta (sepatu) yang dijual, dan pembeli yaitu orang yang menukarkan hartanya (uang) dengan penjual di toko tersebut.

Praktik jual beli sepatu di toko Feetland antara pihak penjual dengan konsumen apabila dilihat dari *sighat* (lafal) *ijab qabul* sudah memenuhi, karena tidak ada yang memisahkan, tidak diselingi kata-kata lain, tidak digantungkan dengan hal lain, tidak ada unsur paksaan baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli dan adanya kesepakatan *ijab* dan *qabul* diantara kedua belah pihak yang saling merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang yang diperjual belikan sudah ada, dimana barang tersebut sudah ada terpajang lengkap dengan klasifikasi harga yang tertera.

Rukun jual beli yang terkandung dalam Hukum Islam sama halnya dengan unsur jual beli hukum Positif yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga.
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

### 3. Syarat

Dalam praktik jual beli yang terjadi di toko Feetland Bandar Lampung syarat barang yang diperjual belikan telah ada ditempat saat transaksi. Semua orang yang melakukan akad sudah dewasa (*baligh*) dan berakal atas kehendak sendiri serta keadaan tidak mubazir yang dapat menimbulkan jual beli sia-sia dan tidak bermanfaat.

Hal ini wajar karena sepatu-sepatu yang dijual di toko itu hanya untuk ukuran orang dewasa, jadi otomatis hanya orang dewasa saja yang melakukan akad. Adapun anak yang belum dewasa namun membeli sepatu tersebut karena ukuran sepatunya sudah memakai ukuran dewasa, akad tersebut dilakukan oleh walinya yang sudah dewasa. Hal ini sesuai untuk terciptanya pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

Penukaran barang sepatu dengan uang oleh pihak penjual dan pembeli yaitu berupa sejumlah uang dengan harga yang tertera di

sepatu. Dengan adanya saling *ridho* atau rasa suka sama suka diantara kedua belah pihak.

Hasil penelitian ini dilihat dari sisi hukum Islam ternyata telah memenuhi unsur sebab *ahliyah* (ahli akad) karena orang yang waras tidak mengalami gangguan jiwa dilakukan dengan rela dan murni barang dimiliki oleh ahli akad, serta orang tersebut tidak mengalami cacat fisik pada bagian mata yang mempengaruhi penglihatannya. Telah memenuhi unsur *lafadz* (ijab qabul) dan *ma'qud alaih* (barang yang diperjual belikan) karena barang yang dijual tidak najis, jelas barangnya serta tidak mengandung unsur penipuan (*tadlis*). Bila di tinjau dari hukum Positif hal ini telah memenuhi unsur jual beli, karena melakukan jual beli tanpa adanya rasa saling suka sama suka tanpa adanya unsur penipuan serta melayani konsumen secara baik dan tidak diskriminatif.

Solusi garansi dan tukar sepatu dalam penjualan sepatu ini termasuk *khiyar ash-shart* yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Penjualan sepatu bermerek Adidas tetapi sepatu tersebut merupakan barang imitasi, pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam tidak ada dalil Al-Qur'an dan Hadis yang menyebutkan hukum dari penjualan sepatu tiruan. Namun masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan muamalah adalah boleh.

Yang terkandung di dalam kaidah fiqih muamalah, sebenarnya hukum jual beli pada umumnya tidak ada masalah, karena sejauh ini belum ada dalil yang mengharamkannya. Akan tetapi dalam transaksi muamalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara kontekstual, jual beli yang dibahas oleh peneliti memang ditemukan banyak kejanggalan. Akan tetapi pada dasarnya jual beli dalam Islam, unsur yang ada dalam jual beli sudah terpenuhi, yaitu unsur suka sama suka antara si penjual dan pembeli.

Bedasarkan data yang diperoleh dari lapangan, ternyata sistem jual beli barang tiruan sepatu merek Internasional Adidas di toko sepatu Feetland Bandar Lampung pada dasarnya sama dengan sistem jual beli umumnya, hanya saja objek barang yang dijual menggunakan barang tiruan. Menyikapi hal tersebut berkaitan dengan hukum dalam Undang-Undang Merek yang saat ini berlaku memang tidak menjangkau konsumen pembeli barang palsu. Secara eksplisit Undang-Undang Merek yang menyebut seluruh tindak pidana penggunaan merek terdaftar oleh para pihak beriktikad buruk tersebut sebagai pelanggaran bukan kejahatan (Pasal 94 Ayat 2 dan Pasal 77 Undang-Undang Merek).

Dalam pasal 95 Undang-Undang Merek menggolongkan seluruh tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut sebagai delik aduan bukan delik biasa. Hal ini berarti bahwa pasal-pasal

pidana dalam Undang-Undang Merek diberlakukan setelah adanya laporan dari seseorang yang dirugikan atas perbuatan orang lain sehingga terkait delik aduan pun penyidikan kepolisian dapat dihentikan hanya dengan adanya penarikan laporan polisi tersebut oleh si pelapor sepanjang belum diperiksa di pengadilan.

Dalam menilai sebuah barang merupakan barang palsu atau bukan di mata hukum pun polisi tidak dapat melakukannya secara sepihak. Dalam sistem perlindungan hak merek yang saat ini dianut oleh Indonesia, yakni sistem *First to File* “pelanggaran merek” hanya terjadi apabila ada tindakan-tindakan penggunaan merek terdaftar oleh pihak-pihak beriktikad buruk yang dilakukan dalam masa perlindungan atas merek yang bersangkutan sebagaimana tertera dalam sertifikat pendaftaran mereknya. Tidak ada pelanggaran tanpa pendaftaran merek dalam sistem *First to file*, perlindungan hukum hanya diberikan kepada pemilik pendaftaran merek. Pelapor harus mampu menunjukkan sertifikat merek atau alasan hak lainnya yang sah pada saat melakukan pelaporan atas suatu tindak pidana merek.

Selain harus mampu menunjukkan bukti kepemilikan merek yang sah, si pelapor harus mampu menunjukkan kepada kepolisian perbedaan-perbedaan antara barang asli dan barang palsu secara jelas. Hal ini tentu saja untuk menghindari penegak hukum melakukan kekeliruan dalam menangkap dan memproses pidana para pelaku pelanggaran merek.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan dan menganalisa data dan sebagaimana yang telah dikemukakan pada halaman-halaman terdahulu, maka dapatlah ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Praktik jual beli sepatu tiruan merek Internasional Adidas yang terjadi pada Toko Feetland Bandar Lampung dan Toko Adidas Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung telah memenuhi unsur-unsur perjanjian jual beli serta rukun, syarat dan objek barang dalam muamalah (hukum ekonomi Islam), maka praktik jual beli sepatu merek Internasional Adidas yang diterapkan oleh pihak toko Feetland Bandar Lampung adalah boleh (*mubah*).
2. Jual beli sepatu tiruan merek Internasional Adidas di toko Feetland Bandar Lampung dan Toko Adidas mall Boemi Kedaton Bandar Lampung menurut Hukum Islam diperbolehkan karena tidak mengandung unsur *tadlis* (penipuan) serta adanya *ridho* (rela dan suka sama suka) dan Hukum Positif diperbolehkan karena sama-sama menyangkut tentang hak-hak konsumen (penjual dan pembeli) yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta penjualan sepatu tersebut dilakukan dengan iktikad baik hingga tidak ada unsur kejahatan baik dari pihak toko Feetland maupun dari pihak pembeli.

### **B. Saran**

Melalui skripsi ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran dengan harapan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang kiranya dapat berguna:

1. Praktik jual beli barang tiruan sepatu Adidas menurut tinjauan hukum Islam diperbolehkan namun kepada pihak penjual maupun pembeli diharapkan untuk menggali dan menambah wawasan atau ilmu tentang

ekonomi Islam, agar dapat memahami dan mengaplikasikan ekonomi Islam dalam bermuamalah (jual beli).

2. Meskipun jual beli sepatu tiruan merek Adidas salah satu pemutar bisnis bagi masyarakat, barang tersebut termasuk ilegal sehingga dapat mengganggu kestabilan ekonomi dan merugikan industri di Indonesia. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah agar adanya sanksi yang tegas serta penegakan hukum yang kuat terhadap jual beli barang tiruan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sohari Sahrani dan Ru'fah. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Al Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, Penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Al Bukhori, Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. No. Hadits 2039.
- Al Bukhori, Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari, Juz II Terjemahan Ahmad Sunarto*, Surabaya: Al-Hidayah, No.hadits 1981.
- Al Bukhori, Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhori*, No.Hadits 2011.
- Ali, H.M. Daud. *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Al-Jazairy, Abdurrahman. *Khitabul Fiqh 'Alal Madzahib Al-Arba'ah Juz II*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990.
- Al-Juhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz IV*, Libanon: Daar Al-Fiqr Beirut, 1989.
- A. Mas'adi, Ghuftron. *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Semarang: IAIN Walisongo, 2002.
- Amrullah, Haji Abdul Malik Karim. *Tafsir Al-Azhar Juz' 1-3*, Semarang: Yayasan Nurul Islam, 1990.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Reneka Cipta, 2013.
- Ar-Rahmi, Syamsudin Muhammad. *Nihayah Al-Muhtaj Juz III*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2004.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2001.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqih Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam, Penerjemah: Nadirsyah Hawari*, Jakarta: Amzah, 2010.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillathuhu* Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1990.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya, cetakan kedua*, Bandung: PT Mizan Buaya Kreativa, 2012.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research, Fakultas Teknologi UGM*, Yogyakarta: UGM Press, 1986.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media, 2009.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.
- Hasanuddin, Oni Sahroni dan M. *Fikih Muamalah; Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- H.S., Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz III.
- Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Hadist Shohih Nomor 2237, (Lidwah Pustaka – Kitab Sembilan Imam).
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluargadan Bisnis, Bandar Lampung: Pusat Penelitiandan Penertiban IAIN Raden Intan Lampung*, 2015.
- Jened, Rahmi. *Hukum Merek (Trade Mark): Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2015.

- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1987.
- Koenjaraningrat, *metode-metode penelitian masyarakat*, Jakarta: gramedia, 1986.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES).
- Mardani. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- M.S, Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah. *Ringkasan Kitab Al Umm, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2*, Jakarta: Pustaka azzam, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian, Cet 9*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Rasyid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh kamaluddin A. Marzuki, *Terjemahan Fiqh Sunnah, Jilid 3*, Bandung: Al Ma'arif, 1987.
- Saidin, Ok. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Intellectual Property Rights*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera hati, 2009.
- Shobirin. "Jual Beli dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No.2 Desember 2015.
- Shohih Bukhari, Imam Bukhari. *Hadits shohih Nomor 1968, (Lidwah Pustaka-Kitab Sembilan Imam)*.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Subendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: rajawali Pers, 2010.
- Sugiyono. *metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Susiadi. *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Sutarman Yodo, Ahmadi Miru. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Sutrisno, *Metodelogi Penelitian Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, Bandung: Fakultas Teknologi UGM, 2009.

Syafei', Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syamillah, Maktabu. Sunan Al-Kubro Lil Baihaqi, *Bab Tamrin Bay'I Fadhlil Ma'I Ladzi Yakunu Bil Falati Wa Yahtaju Ilaihi Yar'I kala'I Tahrim Mani Badlaihi Wa Tahrimu Bay'I Dhirobi Al-Fahli*, juz: 8, tt, hal.3494.

Syarifudin Hidayat, Sedarmayanti. *Metodologi penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002.

Tika, Muhammad Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Tjitrosudibio, R. Subekti dan R. *Kitab Undang-Undang hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.

Wajdi, Surawardi k. Lubis dan Farid. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Yaqub, Hamzah. *Fiqh Mu'amalah; Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1992..

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999  
Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

### **Sumber Internet:**

<https://Kbbi.Web>, diakses Tanggal 29 Mei 2017, 16.30 WIB

<https://VIVA.Co.Id>, diakses Tanggal 29 Mei 2017, 16: 55 WIB

<https://VIVA.Co.Id>, diakses Tanggal 29 Mei 2017, 16: 55 WIB